

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Natuna, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia yang merupakan kepulauan paling tertuar di sebelah utara di Selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di sebelah selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dan disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan dilantiknya Bupati Natuna Drs. H. Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam Negeri ad interim Jenderal TNI Faisal Tanjung di Jakarta. Sebagai daerah otonom, pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan potensi dan kewenangannya menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Natuna.

Di wilayah Kabupaten Natuna terdapat sebanyak 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53%) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau, yakni sebanyak 127 pulau (82,47%) tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut tersebar di 14 Kecamatan, dengan Kecamatan Serasan yang memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 34 pulau (11,76% pulau berpenghuni dan 88,24% tidak berpenghuni), sedangkan Kecamatan Bunguran Tengah sama sekali tidak memiliki pulau. Adapun jumlah masing-masing pulau yang dimiliki setiap kecamatan tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
 Wilayah Kabupaten Natuna dengan Kondisi Penduduk
 yang Menghuni Pulau tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Pulau				Total Pulau	Persentase
		Berpenghuni	%	Tidak Berpenghuni	%		
1	Mida	1	50,00	1	50,00	2	1,30
2	Suak Mida *1	0	0	0	0	0	0
3	Bunguran Barat	3	18,75	13	81,25	16	10,39
4	Bunguran Batubi *	0	0	1	100	1	0,65
5	Bunguran Utara	2	13,33	13	86,67	15	9,74
6	Pulau Laut	3	37,50	5	62,50	8	5,19
7	Pulau Tiga	3	18,75	13	81,25	16	10,39
8	Pulau Tiga Barat (1)	1	50	1	50	2	1,30
9	Bunguran Timur	1	11,11	8	88,89	9	5,84
10	Bunguran Timur Laut	1	10,00	9	90,00	10	6,49
11	Bunguran Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0
12	Bunguran Selatan	0	0,00	6	100,00	6	3,92
13	Serasan	4	11,76	30	88,24	34	22,08
14	Suo	7	30,43	16	69,57	23	14,94
15	Serasan Timur	1	10,00	9	90,00	10	6,49
Jumlah Pulau		27	17,53	127	82,47	154	100

Sumber: RPJMD, 2015

Dari petani google, terlihat bahwa kabupaten ini lebih dekat dengan Kalimantan Barat, Malaysia dan Singapore dibanding ke Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang. Oleh karena itu, orientasi bisnis dan pendidikan masyarakat

menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanaan sebagai berikut:

1. Kewedanaan Tanjungpinang, meliputi Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
2. Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
3. Kewedanaan Lingga, meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.
4. Kewedanaan Pulau Tujuh, meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kewedanaan lainnya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No.UP/247/5/1965. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah 65 administrative kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.

Berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Pal Matak, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.

Hingga tahun 2007 ini Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga,

Hingga tahun 2007 ini Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75. Perincian disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4.2
Wilayah Administratif Kabupaten Natuna
Menurut Kecamatan, Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Daratan (km ²)	Luas Lautan (km ²)	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pulau
1	Mida	26,10	262.167,07	3	2
2	Suak Mida	n.a		3	0
3	Bunguran Barat	448,46		5	16
4	Bunguran Batu	n.a		5	1
5	Bunguran Utara	434,71		6	15
6	Pulau Laut	37,69		3	8
7	Pulau Tiga	67,87		6	16
8	Pulau Tiga Barat	n.a		4	2
9	Bunguran Timur	146,83		6	9
10	Bunguran Timur Laut	235,01		7	10
11	Bunguran Tengah	172,71		3	0
12	Bunguran Selatan	233,99		4	8
13	Serasan	43,66		7	34
14	Subi	160,93		8	23
15	Serasan Timur	23,35		4	10
Kabupaten Natuna		2.001,30	262.167,07	76	154

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna, 2015

Secara administratif, Kabupaten Natuna memiliki 15 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 70 Desa dengan luas wilayah mencapai 264.198,37km, dimana sebagian besar terdiri dari wilayah perairan yakni seluas 262.167,07km² dan sisanya daratan yang merupakan kepulauan seluas 2.001,30 km². Secara rinci, wilayah dengan luas daratan terluas yaitu Kecamatan Bunguran Barat seluas

448,46 km², sedangkan luas daratan tersempit yaitu Kecamatan Serasan Timur seluas 23,35 km².

Kondisi wilayah yang didominasi perairan mengindikasikan bahwa pantai dan perikanan laut beserta kekayaan alam bawah laut termasuk gas menjadi penguat perekonomian daerah yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu jalan menuju pemanfaatan potensi itu adalah perlunya perencanaan menyeluruh yang dapat mengundang ketertarikan pihak luar untuk berinvestasi. Sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki daerah, maka sector pariwisata menjadi yang paling cepat dapat diwujudkan di Kabupaten Natuna.

B. Aspek Demografi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumberdaya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga Kabupaten ini dihuni oleh penduduk pada tahun 2010 berjumlah 69.003 jiwa, yang terdiri dari 35.741 jiwa penduduk laki-laki dan 33.262 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Serasan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni 124,10 jiwa per km², diikuti oleh Kecamatan Midai 123,97 jiwa per km².

Sementara jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2015 mencapai 74.520 jiwa yang terdiri dari 51,54% penduduk laki-laki dan 48,46% perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 35,06% (26.127 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 15,07% (11.231 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Pulau Laut hanya memiliki penduduk sebanyak 3,27% (2.435 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik Jawa ±6%, Tionghoa ± 2%, dan etnik lainnya seperti Minangkabau, Batak, Bugis, dan Banjar ± 7%. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Jumlah Pendudukan di Wilayah Administratif Kabupaten Natuna
Menurut Kecamatan hingga Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Midai	5.031	5.043	5.058	5.065	3.537
2.	Suak Midai *)	n.a	n.a	n.a	n.a	1.601
3.	Bunguran Barat	10.961	10.999	11.045	11.073	7.732
4.	Bunguran Batubi *)	n.a	n.a	n.a	n.a	3.499
5.	Bunguran Utara	3.857	3.886	3.914	3.936	3.993
6.	Pulau Laut	2.241	2.296	2.349	2.400	2.435
7.	Pulau Tiga	4.852	4.865	4.882	4.892	3.300
8.	Pulau Tiga Barat *)	n.a	n.a	n.a	n.a	1.660
9.	Bunguran Timur	23.702	24.396	25.102	25.760	26.127
10.	Bunguran Timur Laut	4.338	4.357	4.379	4.395	4.457
11.	Bunguran Tengah	2.873	2.901	2.930	2.953	2.995
12.	Bunguran Selatan	2.550	2.556	2.566	2.569	2.607
13.	Serasan	4.629	4.715	4.806	4.886	4.956
14.	Subi	2.640	2.684	2.730	2.770	2.810
15.	Serasan Timur	2.747	2.755	2.765	2.771	2.811
Jumlah		70.423	71.454	72.527	73.470	74.520

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna, 2015

Selain letaknya yang strategis kawasan Pulau Natuna dan sekitarnya pada hakikatnya dikaruniai serangkaian potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara memadai, tetapi ada juga yang belum sama sekali, yaitu:

1. Sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna.
2. Pertanian & perkebunan seperti ubi-ubian, kelapa, karet, sawit dan cengkeh.
3. Objek wisata: bahari (pantai, pulau selam), gunung, air terjun, gua dan budidaya.
4. Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.

Objek wisata di Kabupaten ini hampir tidak terkelola dengan baik. pengelolaan potensi wisata di kabupaten ini seadanya dan dengan tidak melibatkan banyak pihak sebagai pelaku usaha di bidang kapariwisata.

Dari system tata ruang, baik Kawasan hutan lindung maupun Kawasan budidaya yang notabene memiliki potensi kepariwisataan juga tidak terkelola dengan baik. Salah satu alasan pengelolaan adalah koordinasi dengan pihak BKSDA di Jakarta yang menyebabkan pemanfaatan ruang potensi ini tidak maksimal. Kondisi pemanfaatan ruang ini disud disajikan dalam table berikut ini

Tabel 4.4
Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Natuna
Tahun 2011-2031

NO	POLA RUANG	LUAS (Ha)	No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	%
1	Hutan Lindung	11.880.3190	1	KAWASAN LINDUNG	6.995.49	13,64
2	Hutan Produksi	51.937.3964	1	Hutan Lindung	11.880.32	6,00
3	Hutan Produksi Terbatas	19.625.4211	2	Mangrove	2.621.40	1,32
4	Industri	1.552.8649	3	Kawasan Resapan Air	1.950.72	0,99
5	Kawasan Resapan Air	1.950.7230	4	Lindung Pulau-Pulau Kecil	1.967.52	0,99
6	Lindung Pulau-Pulau Kecil	1.967.5338	5	Tubuh Air	3.174.81	1,50
7	Mangrove	2.621.4039	6	Rawa	1.947.65	0,98
8	Militer	663.9947	7	RTE	3.453.06	1,74
9	Pariwisata	3.667.2368	3	KAWASAN BUDIDAYA	170.973.26	86,06
10	Perikanan	3.142.0173	1	Industri	1.552.86	0,78
11	Perkebunan	43.323.4052	2	Militer	664.00	0,34
12	Pemukiman Perdesaan	14.477.6530	3	Pariwisata	3.667.24	1,85
13	Pemukiman Perkotaan	13.474.2407	4	Perikanan	3.142.02	1,59
14	Perternakan	2.249.4986	5	Perkebunan	43.323.39	21,82
15	Rawa	1.947.6662	6	Pemukim. Perdesaan	14.477.66	7,21
16	Ruang Terbuka Hijau	3.453.0818	7	Pemukim. Perkotaan	13.474.24	6,81
17	Sawah	4.941.9122	8	Perternakan	2.249.50	1,14
18	Tanaman Pangan Hortikultura	11.917.5984	9	Sawah	4.941.92	2,50
19	Tubuh Air	3.174.7848	10	Tanaman Pangan Hortikultura	11.917.60	6,02
			11	Hutan Produksi	51.937.632	26,16
				TOTAL	197.968.75	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna, 2015

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna, terdapat Perencanaan Struktur Wilayah yang menjadi acuan dalam pengembangan berbagai infrastruktur penunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Natuna itu meliputi; Sistem Pusat Kegiatan, Sistem Jaringan Utama dan Sistem Jaringan Prasarana lainnya. Ketiga system perencanaan tersebut tentu terkoneksi dengan sector pariwisata dan bahkan Kawasan penataan ruang sebagaimana tersebut dalam table di atas terkait langsung dengan kepariwisataan.

C. Sistem Transportasi Dan Penerbangan

Sebagai daerah kepulauan, maka system transportasi yang dibangun oleh daerah adalah darat, laut dan udara. Ketiganya memiliki tantangan yang sama berat

tidak saja terhubung dengan kualitas pelayanan tetapi juga aksesibilitas daerah. Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Natuna meliputi: bandar udara, jalur penerbangan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan. Bandar udara meliputi a). Bandar udara pengumpul Ranai dengan skala pelayanan tersier di Kecamatan Bunguran Timur; b). Pengembangan bandara perintis di Subi; dan c). Pengembangan bandara perintis di Serasan. Jalur penerbangan yang sudah beroperasi meliputi a) Natuna – Batam; b) Natuna - Pontianak; c) Natuna - Tanjungpinang; dan d) Natuna – Jakarta.

Selain jalur penerbangan, konektivitas antar pulau dan antar kabupaten yang belum menjangkau seluruh kabupaten juga terus ditingkatkan. Transportasi antar pulau memang belum memadai dari aspek kualitas sarpras (pelabuhan dan dermaga dan kapal angkutan umum). Namun, koneksi antar pulau sudah diupayakan, ditandai dengan adanya sejumlah pelabuhan internasional, yakni sebanyak 11 unit, pelabuhan barang internasional sebanyak 6 unit, pelabuhan perintis sebanyak 5 unit, pelabuhan samudera sebanyak 3 unit.

Bidang perhubungan yang terkait dengan perhubungan darat dilakukan peningkatan konektivitas melalui pelayanan angkutan umum (berupa uji KIR kendaraan umum, pengelolaan parkir, pembangunan terminal dan penerbitan ijin trayek). Untuk perhubungan udara dalam periode RPJMD 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Natuna menargetkan penambahan frekuensi penerbangan melalui peningkatan kerja sama dengan maskapai penerbangan dan penyiapan lahan rencana pembangunan bandara internasional di Kecamatan Bunguran Utara. Perhubungan laut difokuskan untuk penyelesaian pembangunan pelabuhan-

pelabuhan yang menjadi simpul transportasi laut di kabupaten dan kecamatan dan juga mendukung percepatan pembangunan pelabuhan utama di Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara. Gambaran tentang koneksi internal di daerah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Sistem Koneksi Internal di Kabupaten Natuna
Kondisi Tahun 2015

No	Jenis Jaringan Angkutan Penyeberangan	Lintasan Jaringan Angkutan Penyeberangan
1	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Provinsi	1 Serasan (Kabupaten Natuna) – Pontanak/Sintete (Provinsi Kalimantan Barat) 2 Penag (Kabupaten Natuna) – Pontanak/Sintete (Provinsi Kalimantan Barat)
2	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	1 Matak (Kabupaten Kepulauan Anambas) – Mida (Kabupaten Natuna) – Penag (Kabupaten Natuna)
3	Jaringan Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota	1 Pulau Subi - Rana (Pulau Bunguran) 2 Kelank (Pulau Bunguran) - Pulau Sepang 3 Sementeh (Pulau Bunguran) - Pulau Kedurung 4 Rana (Pulau Bunguran) - Pulau Subi 5 Pulau Subi - Pulau Serasan 6 Sepang Sisi (Pulau Bunguran) - Pulau Tiga 7 Sepang Sisi (Pulau Bunguran) - Pulau Mida 8 Pulau Mida - Pulau Tiga 9 Pulau Tiga - Tanjung Kumbik, dan 10 Pulau Tiga - Pulau Terak Dedak

Sumber: RPJMD, 2015.

Program meningkatkan aksesibilitas daerah, dengan indikator jumlah kecamatan yang sudah terakses jalan juga sudah cukup baik, sebanyak 15 kecamatan sudah memiliki sarpras jalan yang baik. Indikator kekinambungan dan kemajuan suatu daerah salah satunya adalah penyediaan fasilitas infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang

penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah kabupaten Natuna dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya.

Terkait dengan program yang mendukung pembangunan pariwisata ini, termuat dalam RPJMD 2016 - 2012 ada pada tujuan kelima yakni meningkatkan aksesibilitas daerah, dengan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya konektivitas kecamatan/desa, dengan indikator jumlah kecamatan/desa sudah terakses pelabuhan sejumlah 60, jumlah kecamatan sudah terakses angkutan darat sejumlah 7 kecamatan, dan jumlah kecamatan sudah terakses jalan sejumlah 15 kecamatan.
- 2) Meningkatnya konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah, dengan indikator jumlah kawasan strategis ekonomi yang terakses (armada laut) sejumlah 22 kawasan, jumlah kawasan strategis ekonomi yang terakses angkutan darat sejumlah 7 kawasan, dan persentase kawasan strategis ekonomi sudah terakses jalan sejumlah 100 persen kawasan, dan jumlah frekwensi penerbangan (per minggu) sejumlah 12 penerbangan.

Oleh karena itu, salah satu kendala pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Natuna, tidak saja berasal dari keterbatasan kapasitas daerah, tetapi juga koneksi daerah melalui jalur udara. Bila ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten

Natuna perlu merencanakan pengembangan pelabuhan laut dalam agar dapat dilayari oleh kapal pesiar dunia mengingat letak kawasan ini memang berada di perlintasan pelayaran dunia.

D. Kondisi Kepariwisataaan Daerah

Wilayah Kabupaten Natuna yang sebagian besar atau lebih dari 99,25 persen merupakan lautan dengan letak strategisnya sebagai garda terdepan sebelah utara Indonesia serta berbatasan langsung dengan perairan beberapa negara. Sebagai gugusan kepulauan wilayah Kabupaten Natuna memiliki pemandangan potensi sumber daya alam bahari yang sangat besar.

Kekayaan laut Natuna mulai dari kekayaan bawah lautnya yang menjadi habitat tempat hidupnya beragam jenis ikan dan hewan laut lainnya serta menyimpan potensi keindahan alam yang sangat mempesona. Potensi alam yang menjadi daya tarik pariwisata seperti panorama pantai pasir putih dan pantai dengan hiasan hamparan batu-batuan alam yang eksotis serta masih terjaga keasriannya. Apalagi potensi keindahan alam bawah lautnya yang memiliki kekayaan diversitas biota laut yang masih alami.

Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Natuna yang mayoritas berupa obyek wisata bahari tersebut tentu saja merupakan sumberdaya alam potensial yang dapat dikembangkan. Untuk itulah peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki Kabupaten Natuna tersebut menjadi sedemikian penting untuk lebih diprioritaskan. Berikut ini tabel objek dan daya tarik wisata Kabupaten Natuna.

Tabel 4.6
Lokasi Objek Wisata dan Luas Kawasan Wisata
Kabupaten Natuna Tahun 2015

NO. KECAMATAN	KECAMATAN	DESA	NAMA OBJEK WISATA (OBJEK WISATA)	JENIS OBJEK WISATA	LUAS KAWASAN (Ha)
01	Kec. Bunguran Timur	Kel. Ranai	1. Pantai Kencana	Wisata Alam	-
			2. Batu Kapal	Wisata Alam Bahari	-
			3. Senubing / Batu Sindu	Wisata Alam	± 5 Ha
			4. Batu Rusia	Wisata Alam	± 1 Ha
			5. Air Terjun G. Ranai	Wisata Alam	± 10 Ha
		Desa Scpempang	6. Pulau Senoa	Wisata Bahari, Wisata Alam	± 27 Ha
			7. Alif Stone	Wisata Alam	-
		Kel. Ranai Darat	8. Kolam Renang Halimun Harmain	Wisata Minat Khusus	± 1.5 Ha
		Kel. Bandarsyah Pering	9. Wisata Mangrove / Bakau	Wisata Mangrove	-
		Desa Kelanga Semitan	10. Wisata Mangrove / Bakau	Wisata Mangrove	-
02	Kec. Bunguran T. Laut	Ds. L. Manis, Ds. Tanjung	1. Teluk Selalang / Pantai Tanjung	Wisata Bahari, Wisata Alam	± 11 Ha
		Desa Limau Manis	2. Pulau Sahu	Wisata Alam	± 3 Ha
			3. Sengiap	Wisata Bahari	± 6 Ha
		Desa Tapang	4. Tanjung Migit	Wisata Alam	-
			5. Teluk Muara	Wisata Alam	-
			6. Tanjung Datuk	Wisata Alam	± 7 Ha
		Desa Ceruk	7. Wisata Agro Ceruk	Wisata Agro	± 7 Ha
			8. Air Terjun Gunung Air Hiu	Wisata Alam	± 2 Ha
03	Kec. Bunguran Selatan	Desa Cemaga Tengah	1. Pantai Batu Kasah	Wisata Bahari, Wisata Alam	± 20,5 Ha
		Desa Cemaga	2. Pantai Cemaga	Wisata Bahari	± 3,5 Ha

		Desa Cemaga Selatan	3. Pulau Kemudi	Wisata Bahari, Wisata Alam	± 9,5 Ha
			4. Pantai Pian Padang	Wisata Bahari	-
			5. Teluk Panglima	Wisata Alam	-
			6. Wisata Mangrove / Bakau	Wisata Mangrove	-
			7. Sebagul	Wisata Bahari	± 3,5 Ha
			8. Teluk Depeh	Wisata Bahari, Wisata Alam Pantai	± 4,6 Ha
			9. Teluk Depeh	Wisata Alam Pantai, Wisata Agro	± 5,5 Ha
04	Kec. Bunguran Tengah	Desa Air Lengit	1. Bendungan Tapau	Wisata Turta/Air	± 10 Ha
			2. Hutan Wisata	Wisata Alam	-
05	Kec. Bunguran Utara	Desa Teluk Buton	1. Pulau Panjang	Wisata Alam Pulau	-
			2. Pantai Teluk Buton	Wisata Alam Pantai, Wisata Bahari	± 6 Ha
			3. Teluk Pelading	Wisata Alam	-
			4. Tanjung Semut	Wisata Alam	-
		Desa Ketarik	5. Tanjung Pasir	Wisata Alam	-
			6. Pantai Mabai	Wisata Alam	-
06	Kec. Bunguran Barat	Sedanau	1. Pantai Pasir Marus	Wisata Bahari	± 1,5 Ha
			2. Pulau Kembang	Wisata Alam Pulau, Wisata Bahari	± 10 Ha
			3. Pulau Pasir	Wisata Alam Pulau, Wisata Bahari	± 1,2 Ha
			4. Pulau Jalik	Wisata Alam Pulau, Wisata Bahari	-
			5. Pulau Sedanau	Wisata Bahari	-
07	Kec. Pulau Tiga	Desa Sabang Mawang	1. Pulau Sedanau	Wisata Bahari, Wisata Selam	± 6 Ha
			2. Pulau Setai	Wisata Bahari, Wisata Selam	-
		Selat Lampa	3. Selat Lampa	Wisata Bahari	± 3 Ha
		Desa Sededap	4. Pulau Hantu	Wisata Alam, Wisata Bahari	-
		Desa Tanjung Kumbik	5. Sepasir	Wisata Bahari	-
			6. Pulau Burung	Wisata Alam, Wisata Bahari	-
			7. Pulau Kumbik	Wisata Alam, wisata minat khusus	-

08	Kec. Pulau Laut	Desa Air Payang	1. Pantai Air Payang	Wisata Bahari	-
			2. Pantai Kadur	Wisata Bahari	-
		Desa Tanjung Pala	3. Tanjung Balau	Wisata Alam	-
			4. Pulau Sekatung	Wisata Bahari, Wisata Alam	-
09	Kec. Midai	Desa Gunung Sebelat	1. Pantai Tanjung Harapan	Wisata Bahari	-
		Desa Timau	2. Pulau Timau	Wisata Bahari, Wisata Alam	-
			3. Tanjung Kapal	Wisata Alam	-
10	Kec. Serasan	Desa Jermalik	1. Pantai Sisi	Wisata Bahari	± 15 Ha
			2. Pantai Air Gelom	Wisata Bahari	± 6 Ha
		Desa Tanjung Balau	3. Pulau Sedarak	Wisata Bahari, Wisata Alam	-
			4. Batu Catur	Wisata Alam	± 2 Ha
			5. Batu Senduyung	Wisata Alam	-
11	Kec. Serasan Timur		1. Tanjung Tebung	Wisata Alam	-
			2. Pulau Sepadi	Wisata Alam	-
			3. Pulau Genting	Wisata Alam	-
			4. Pulau Penyamuk	Wisata Alam	-
			5. Pulau Perhantuan	Wisata Alam	-
			6. Pulau Kepala	Wisata Alam	-
12	Kec. Subi	Desa Subi Besar	1. Pantai Lingkung	Wisata Bahari	-
		Desa Subi Kecil	2. Pulau Tembalui	Wisata Alam	-

Sumber Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, sebanyak 12 kecamatan memiliki potensi pariwisata yang dapat dijual dan dikembangkan. Dan hampir keseluruhan kecamatan memiliki potensi wisata.

Belum terbangunnya potensi wisata secara optimal di Kabupaten Natuna menjadikan sektor pariwisata daerah ini belum dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa kendala dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Natuna yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, belum dikelolanya obyek wisata potensial, sumberdaya pariwisata yang masih kurang, serta belum menjadi prioritas bagi pembangunan Kabupaten Natuna selama ini.

Pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan daerah. Dengan dijadikannya Kabupaten Natuna sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia dan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional diharapkan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Natuna semakin meningkat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna merupakan salah satu pendorong kegiatan perekonomian masyarakat Natuna melalui besaran uang yang dikeluarkan selama berwisata di Kabupaten Natuna. Adapun perkembangan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Natuna mengalami kenaikan yang baik dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Ke Kabupaten Natuna 2015

NO	TAHUN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	2011	23	Daftar diperoleh hanya dari Polres Natuna (hanya wisatawan yang masuk ke Ranai), Pemda masih mengalami kendala dalam pendataan kunjungan wisman ke Natuna karena wisman sudah melapor di Imigrasi Batam sebagai pintu masuk wisman ke Kepri dan tidak wajib lapor di Imigrasi Natuna.
2.	2012	267	
3.	2013	294	
4.	2014	323	
5.	2015	340	
TOTAL		1.247	

Sumber Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, 2015

Tabel 4.8
Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Ke Kabupaten Natuna

NO	TAHUN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	2011	3.000	Data diambil dari jumlah tamu penginapan di Natuna
2.	2012	4.256	
3.	2013	10.314	
4.	2014	10.668	
5.	2015	10.970	
TOTAL		39.208	

Sumber Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. 2015

Dari tabel di atas kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Natuna relatif mengalami kenaikan signifikan, hal ini karena masuknya kapal pesiar orion dan kapal yacht ke Natuna, dimana pada Tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah kunjungan dari Tahun 2012.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna akan berdampak pula terhadap usaha perekonomian masyarakat yang ada. Adanya permintaan wisatawan akan beragam variasi kuliner dan souvenir khas daerah dapat memacu pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Natuna. Sementara jumlah sarana hotel (umumnya berupa penginapan) yang ada di Kabupaten Natuna, terlihat dari tabel berikut.

Tabel 4.9
Jumlah Sarana Hotel/Penginapan
Di Kabupaten Natuna

No	KABUPATEN	BANYAKNYA HOTEL	KAMAR
1.	Midai	4	25
2.	Bunguran Barat	6	70
3.	Bunguran Utara	4	16
4.	Bunguran Timur	14	283
5.	Bunguran Timur Laut	0	0
6.	Pulau Tiga	2	13
7.	Pulau Laut	1	6
8.	Bunguran Tengah	0	0
9.	Bunguran Selatan	0	0
10.	Serasan	3	23
11.	Serasan Timur	0	0
12.	Subi	3	22
	Jumlah	37	458

Sumber Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, 2015

Dari table di atas, pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna memang tergolong masih sangat kecil sehingga perlu dipacu dengan sinergi program yang terintegrasi dalam satu perencanaan destinasi.

4. Struktur Organik Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan. Dinas ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Secara nomenklatur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Adapun Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna sendiri adalah :

1. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Mengkoordinasikan penyusunan program di bidang pariwisata dan kebudayaan.
3. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan.
4. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kebudayaan.
5. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan daya tarik wisata.
6. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan kawasan strategis pariwisata.
7. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan destinasi pariwisata.

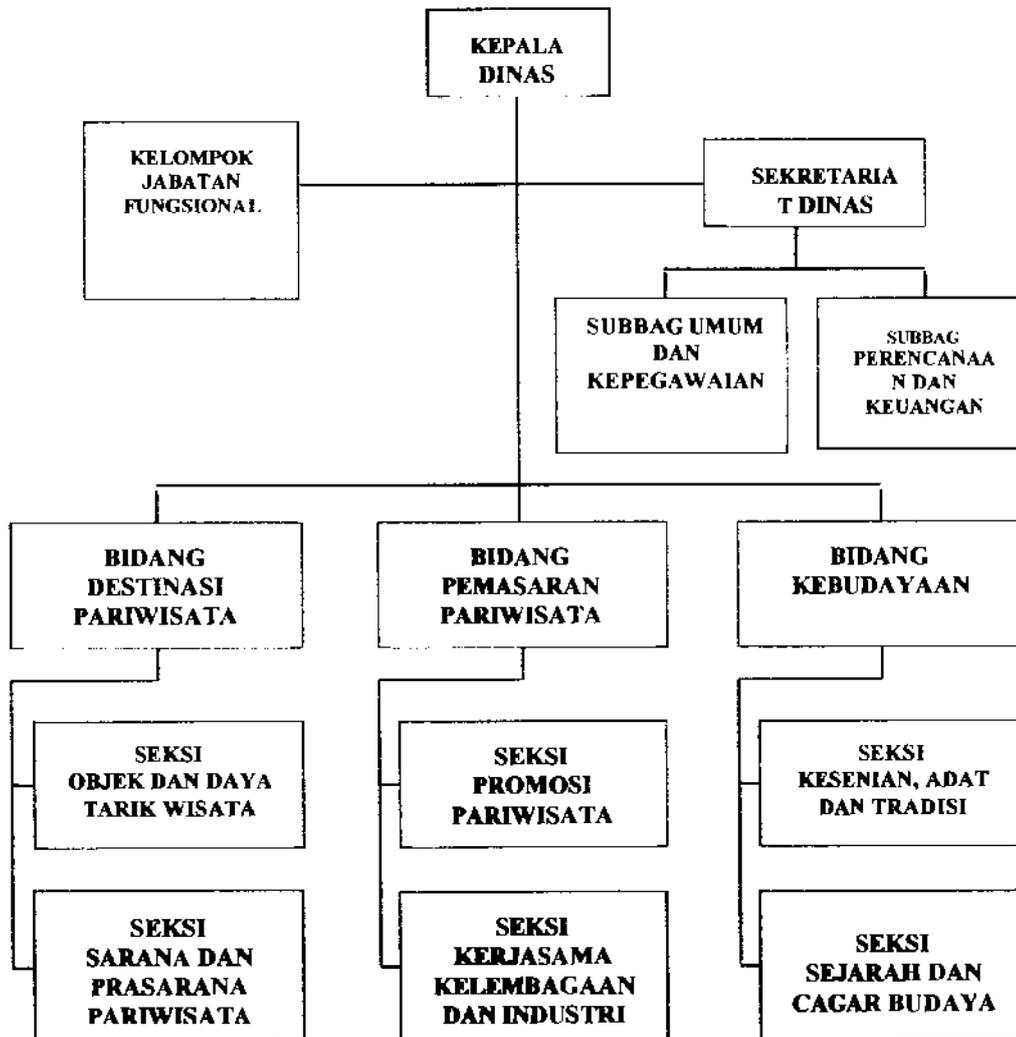
8. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan industri dan usaha pariwisata
9. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
10. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
11. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis penyediaan sarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah.
12. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
13. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pariwisata dan kebudayaan.
14. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara lengkap, struktur organisasi Dinas dapat digambarkan pada struktur organisasi sebagaimana terdapat pada halaman berikutnya; sementara keterangan mengenai bidang-bidang dari struktur organik dinas dijabarkan dalam uraian berikutnya.

Tabel 4.10
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. NATUNA
Nomor : 6 Tahun 2016
Tanggal : 26 Oktober 2016



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
Kab. Natuna, 2015

Dari struktur Organisasi Dinas sebagaimana tersebut di halaman sebelumnya, terdapat beberapa bidang organisasi penting yang secara langsung berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan destinasi wisata, diantaranya adalah:

1. Bidang Destinasi Pariwisata

Dalam mengembangkan sektor pariwisata, hal utama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi obyek dan daya tarik wisata serta mendata segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek dan daya tarik wisata tersebut misalnya nama obyek wisata, luas areal, pengelola, jarak tempuh, sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia. Kemudian mulai melakukan penataan obyek dan daya tarik wisata yang terencana mulai dari pembuatan RIPPDA dan DED hingga realisasi pembangunannya serta pencarian investor yang bersedia mengembangkan usaha pariwisata di Kabupaten Natuna.

Pengembangan obyek dan daya tarik wisata tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Dengan melakukan pembinaan, pemberdayaan dan kerjasama usaha dengan masyarakat yang membuka usaha ekonomi di sektor pariwisata akan dapat mempercepat pengembangan dan pembangunan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata yang telah dilakukan adalah identifikasi dan regulasi obyek wisata unggulan, pembuatan rencana pengembangan obyek wisata berupa DED, Kerjasama kemitraan dengan pemilik obyek wisata, membangun sumber daya manusia melalui pembentukan dan pelatihan lima (5) Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) seperti pelatihan Scuba Diving, pembuatan souvenir, kuliner dan manajemen perhotelan serta pelatihan fotografer/videografer, membangun sarana

dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh sebuah obyek agar lebih baik seperti membangun sarana dan prasarana seperti toilet, tempat parkir, gazebo dan homestay di obyek wisata unggulan yang ada dalam mendorong peningkatan investasi di lokasi Destinasi unggulan untuk pengembangan kepariwisataan di Natuna.

2. Bidang Pemasaran Pariwisata

Berdasarkan data tahun 2011 - 2015, kunjungan wisatawan mancanegara ke Natuna sebanyak 1.247 orang. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah kunjungan wisatawan lokal pada tahun 2012 - 2013 juga mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan kunjungan wisatawan lokal tahun sebelumnya. Upaya pemasaran yang telah dilakukan oleh bidang pemasaran pariwisata adalah mulai dari meningkatkan citra pariwisata Natuna agar lebih dikenal oleh calon wisatawan nusantara maupun mancanegara. Upaya tersebut adalah dengan beberapa kegiatan promosi wisata yang dilakukan yaitu dengan menginformasikan potensi dan destinasi obyek dan atraksi wisata unggulan Natuna di berbagai media cetak dan elektronik, melalui internet dan website serta mengekspose segala potensi pariwisata melalui media sosial serta kerjasama promosi dengan televisi swasta nasional melalui tantangan wisata mereka yang cukup efektif menarik minat wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Natuna.

Selain ekspos di media, juga berpartisipasi pada berbagai pameran pariwisata di berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara yang dirasakan

potensial bagi mendatangkan wisatawan ke destinasi wisata yang ada di Natuna. Penyelenggaraan event tahunan juga sudah dilakukan dengan menggelar event lomba mancing, festival wisata bahari, festival permainan rakyat, dan event pagelaran seni dan budaya daerah. Pemasaran juga dilakukan dengan menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pelaku usaha wisata.

Di tahun 2011 - 2015 Bidang Pemasaran Pariwisata telah merekomendasikan kepada Kecamatan dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk mengeluarkan izin Pariwisata berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk beberapa usaha pariwisata yang baru dibuka dan belum terdaftar sebelumnya yaitu:

- a) Perizinan Hotel dan Penginapan.
- b) Perizinan Tour & Travel.
- c) Perizinan Tempat Hiburan.
- d) Perizinan Rumah Makan dan Restaurant.
- e) Perizinan Arena Permainan.

Dari jumlah perizinan tersebut di atas maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna telah merekomendasikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebanyak 43 TDUP usaha. Kesemua Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut berada di Kecamatan Bunguran Timur yang dikeluarkan oleh Camat setempat dengan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

3. Bidang Kebudayaan

Pengembangan Bidang Kebudayaan meliputi program pelestarian dan pembinaan kesenian, adat dan tradisi budaya melayu Natuna serta pelestarian cagar

budaya dan dokumentasi sejarah. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendata dan menginventarisir berbagai kesenian, adat dan tradisi budaya yang menjadi ciri khas dan otentik Natuna. Kemudian melakukan dokumentasi data serta gambar dan video tentang keunikan masing masing kesenian yang menarik. Melakukan pembinaan pada sanggar-sanggar seni yang ada baik yang bergerak dibidang seni tari, lagu melayu, kesenian khas Natuna seperti Mendu, topeng, hadrah dal kesenian lainnya, aupun permainan rakyat tradisional yang masih ada dan dimainkan hingga saat ini. Pembinaan penampilan yang lebih menarik dari seni budaya tersebut.

Kegiatan yang telah dilakukan adalah menyelenggarakan pagelaran kesenian dengan melibatkan masyarakat dan sanggar-sanggar seni serta sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Natuna. Dengan dilibatkannya masyarakat untuk berpartisipasi meramaikan dan mengekspresikan kesenian tradisi yang mereka miliki diharapkan akan dapat sekaligus melestarikan seni, adat dan tradisi yang ada di Kabupaten Natuna.

5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membutuhkan dukungan anggaran. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada table berikut. Dari table tersebut, terlihat bahwa anggaran daerah untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna hingga 2015 masih cukup kecil dan proporsi itu hampir tidak berubah karena system penganggaran yang diterapkan

daerah menggunakan system incremental, yakni system tambal sulam dari kondisi yang sudah ada dan berlaku di masa sebelumnya. Mata Anggaran yang kosong tidak ditampilkan dalam table ini. Jumlah program yang diusulkan sebanyak 15 program, namun program yang terisi anggaran hanya 5 program, yakni:

- 1) Program pengembangan nilai budaya,
- 2) Program pengelolaan kekayaan budaya,
- 3) Program pengelolaan keragaman budaya,
- 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya,
- 5) Program peningkatan peran serta kepemudaan;
- 6) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,
- 7) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
- 8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 9) Program Pengembangan Kemitraan
- 10) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 11) Program Peningkatan disiplin aparatur
- 12) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 13) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 14) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 15) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tabel 4.11
Anggaran Daerah Untuk Pembangunan Pariwisata
Di Kabupaten Natuna, 2015

No	Nama Program	Usulan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	710.909.508,00	679.493.008,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.671.700,00	63.650.500,00
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	779.916.950,00	749.900.550,00
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	41.255.800,00	35.825.000,00
5	Program Pengembangan Kemitraan	454.170.200,00	373.494.200,00
TOTAL 2015		2.049.924.158,00	1.902.363.258,00

Sumber: Dinas Parbud Kab. Natuna, 2015

Dengan kondisi pendanaan yang seperti ini, praktis beberapa tantangan yang telah diidentifikasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Beberapa tantangan dimaksud adalah:

a. Bidang Destinasi Pariwisata meliputi:

- 1) Belum adanya lahan di lokasi strategis pariwisata yang dibangun masyarakat/pihak swasta.
- 2) Persaingan daya tarik objek dan daya tarik wisata dengan daerah lain.
- 3) Aksesibilitas ke Natuna masih terbatas dan high cost.
- 4) Pengembangan objek dan daya tarik wisata yang mempunyai daya saing.
- 5) Koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan daerah tujuan wisata belum optimal.
- 6) Komitmen menjalankan prioritas pembangunan pariwisata.

- 7) Natuna sudah ditetapkan sebagai KSPN tetapi belum menjadi 10 lokasi prioritas pengembangan destinasi untuk membentuk Bali baru.

b. Bidang Pemasaran Pariwisata meliputi:

- 1) Potensi pariwisata cukup besar untuk menjadi sumber yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tetapi belum termanfaatkan secara maksimal dalam pengembangan pariwisata.
- 2) Natuna harus menghadapi persaingan pemasaran obyek-obyek wisata dari daerah lain, terutama yang menjual industri pariwisata bahari, misalnya Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Raja Ampat, Bangka Belitung, Pulau Bawah Anambas dan Pulau Nikoi Bintan.

c. Bidang Kebudayaan; meliputi:

- 1) Belum adanya kebijakan yang mendasar tentang pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan kesenian daerah.
- 2) Arus perkembangan global yang berdampak pada perubahan pola pikir kaum muda terhadap kesenian tradisional.
- 3) Kurangnya minat masyarakat terhadap nilai seni dan kesenian yang dapat mengancam upaya pelestarian seni dan kesenian daerah di dalam wilayah Natuna.
- 4) Masih lemahnya karakter masyarakat Natuna terhadap perilaku yang berbudaya melayu dan keislaman.

Oleh kaerena itu, penganggaran daerah untuk pengembangan pariwisata juga penting. Selain anggaran, perencanaan pariwisata yang diarahkan untuk memperkuat peluang juga perlu dilakukan oleh daerah. Peluang-peluang pengembangan yang telah teridentifikasi, tetapi belum dapat dimanfaatkan diantaranya adalah:

- 1) Natuna memiliki kekayaan alam wisata bahari yang indah, baik pemandangan alam maupun kekayaan ekosistem laut yang masih alami yang dapat menjadi modal penarik investor untuk mengupayakannya menjadi ladang bisnis yang dapat menguntungkan investor, daerah dan masyarakat.
- 2) Pada dasarnya masyarakat Natuna merupakan masyarakat yang ramah dan memiliki keramahan dan kesadaran untuk dapat melukan pelayanan kepada wisatawan; sehingga modal social ini menjadi basis penerimaan wisatawan ketika melakukan kunjungan wisata ke seluruh wilayah Kabupaten Natuna.
- 3) Lokasi Kabupaten Natuna yang dekat dengan Singapura, Pulau Batam dan Pontianak sangat mendukung untuk menarik minat dan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, terutama wisatawan dari Singapura, Malaysia dan Tiongkok untuk singgah ke Natuna; terutama melalui kapal laut.
- 4) Gencarnya pengembangan dan promosi obyek-obyek wisata bahari di Indonesia menjadi menguntungkan bagi Natuna yang memang merupakan salah satu basis dari wisata bahari nasional.
- 5) Natuna memiliki kekayaan Seni Khas Melayu di satu sisi dan tingginya minat wisatawan mancanegara terhadap kesenian tradisional pada sisi lain sangat

memungkinkan untuk dikembangkan dan dilestarikan sebagai pengisi acara-acara resmi pemerintah atau pada atraksi di destinasi wisata.

- 6) Banyaknya penyelenggaraan event-event atraksi seni di dalam dan luar daerah menjadikan sebuah peluang kerjasama dalam pengembangan kesenian daerah, baik di destinasi Natuna maupun pada destinasi di luar Natuna.

Kajian selanjutnya adalah memperkuat posisi keunggulan daerah dengan memperkuat sistem perencanaan pengembangan daerah agar peran pemerintah secara nyata dalam upaya pengembangan destinasi yang bersinergi dengan pembangunan ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan pada periode-periode selanjutnya. Oleh karena itu, hasil studi ini dapat dikembangkan lagi oleh pemda agar menjadi Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna untuk masa 25 tahun ke depan.

B. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini akan memaparkan Perencanaan Dan Jenis-Jenis Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Mewujudkan Kepariwisataan Berbasis Keunggulan Yang Kompetitif

1. Kebutuhan dan Jenis Dokumen Perencanaan dalam rangka Pengembangan

Objek Daya Tarik Wisata Berbasis Keunggulan Kompetitif Daerah

1.1 Integrasi Perencanaan Daerah dan Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan pariwisata memuat Indikasi Program Pembangunan Destinasi, Program Pembangunan Industri Wisata; Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata. Ketika menelisik RIPPARNAS; dari 50 destinasi Unggulan tahun 2010 – 2025; disebutkan destinasi pariwisata nasional di Kabupaten Natuna adalah berkaitan dengan wisata bahari. Namun, tidak juga kemudian meninggalkan jenis wisata yang berkaitan dengan bahari diantaranya wisata budaya dan peninggalan sejarah, serta wisata budaya etnik. Kemudian dalam bagian lain; juga disebutkan bahwa wisata agro juga masih dapat dikembangkan di Kabupaten Natuna.

Oleh karena itu, detil tentang destinasi Kabupaten Natuna yang berbasis bahari ini adalah melengkapi RIPPARNAS 2010 – 2025. Selanjutnya; dalam dokumen RIPPARDA Provinsi Kepulauan Riau juga disebutkan banyak destinasi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk juga kepariwisataan di Kabupaten Natuna; seluruh destinasi yang ada itu terbagi menjadi destinasi alam, religi, budaya dan buatan. Di sisi

lain; keberadaan destinasi ini sangat membutuhkan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas; hampir semua destinasi ini kondisinya hampir tidak mendukung. Oleh karena itu; agar efektif; maka pengembangan destinasi wisata akan memilih beberapa destinasi sebagai destinasi unggulan untuk kemudian bergerak ke destinasi lain sebagai destinasi pengembangan. Destinasi wisata di Kabupaten Natuna sebanyak 67 unit seperti terekap berikut ini.

Tabel 5.1
Jumlah dan Karakteristik Destinasi Wisata
Di Kabupaten Natuna hingga 2018

Letak Kawasan Wisata Menurut Kecamatan	Jumlah Destinasi	Karakteristik Destinasi Secara Umum
Kec. Bunguran Selatan	9	Alam, bahari dan mangrove, minat khusus
Kec. Bunguran Tengah	2	Alam, bahari, mangrove dan agro
Kec. Bunguran Utara	6	Alam, bahari, mangrove dan agro
Kec. Bunguran Barat	5	Alam dan bahari
Kec. Pulau Tiga	7	Bahari (selam)
Kec. Pulau Laut	4	Alam dan bahari
Kec. Midai	3	Alam dan bahari
Kec. Serasan	5	Alam dan bahari
Kec. Serasan Timur	6	Alam dan bahari
Kec. Subi	2	Alam dan bahari
Total	67	Alam, bahari, selam, agro dan minat khusus

Sumber: Peneliti, disarikan dari RPJMD 2015

Dari tabel yang terdapat di halaman 72, ditemukan sebanyak 67 destinasi yang terletak di 12 Kecamatan se Kabupaten Natuna. Keseluruhan Destinasi didominasi oleh wisata alam dan bahari. Kondisi ini cukup membuat sulit bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menentukan destinasi yang menjadi pusat pengembangan; terlebih beberapa destinasi berada tidak dalam satu daratan. Salah seorang wisatawan domestik (berinisial AR, 48 tahun) yang saat penulis melakukan kunjungan lapangan sedang menikmati hari libur bersama keluarga di salah satu destinasi, mengatakan kepada peneliti bahwa:

Saya dapat memahami mengapa destinasi wisata di Kabupaten Natuna ini hampir tidak bergerak? Sejak ditetapkan menjadi daerah kabupaten tahun 1999, hingga saat ini tahun 2018, kondisi pariwisata di sini, ya begitu-begitu saja. Hampir tidak ada investasi pemerintah dalam membangun kawasan wisata, apalagi bernuasa keunggulan daerah. Investasi di sini hanya dilakukan oleh masyarakat yang kebetulan memiliki usaha. Mereka membangun warung dan tempat istirahat ini seadanya dengan tujuan menarik pengunjung agar mampir ke warung mereka dan bukan untuk menarik kunjungan wisatawan. Promosi kepada wisatawan nusantara dan apalagi kepada wisatawan manca secara terprogram hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, pemerintah agaknya tidak berani lakukan itu karena memang belum ada hal yang dapat kita suguhkan kepada mereka kecuali keindahan alam yang memang begini adanya.

Dari penjelasan informan di atas, ketika dihubungkan dengan kondisi di lapangan, memang nyata adanya. Destinasi yang ada lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar (wisatawan domestic). Kemudian, di tempat wisata dibangun warung-warung kecil sebagai tempat berjualan dan juga sebagai tempat pengunjung jajan ketika berada di destinasi. Gambar berikut memperlihatkan kondisi ini. Keberadaan warung bukan bertujuan untuk mengundang tamu untuk datang, tetapi hanya untuk tempat mereka istirahat saat melakukan kunjungan ke destinasi. Belum ada investasi pemerintah di sini dan semuanya dibangun secara perorangan oleh para pedagang yang secara kebetulan memiliki tanah atau penyewa lapak berjualan dengan pemilik lahan. Pilihan kunjungan ke destinasi adalah hak otoritas pengunjung dan tidak berkaitan dengan keunggulan destinasi.

Salah seorang pedagang di kawasan destinasi berharap, pemerintah menyediakan semacam infrastruktur bagi pedagang untuk berjualan. Dengan memanfaatkan fasilitas itu, kesempatan berkembang bagi pedagang juga akan sama. Selain itu, pemerintah dapat melakukan pendataan terhadap pengunjung sehingga pemerintah memiliki database terkait jumlah kunjungan masyarakat pada suatu destinasi; meskipun secara keseluruhan, ketika turis berkunjung ke Kabupaten Natuna, wisatawan itu pasti berkunjung ke semua destinasi di Pulau Natuna Besar ini.

Saya berharap, ke depan pemerintah Kabupaten Natuna dapat membangunkan kami tempat berjualan (bagi pedagang) yang representatif. Apa yang kami lakukan ini kan juga adalah untuk pelayanan kepada public. Jadi, layanan kepada masyarakat dapat dititipkan kepada kami. Pemerintah, melalui Dinas pariwisata dapat melakukan kendali atau pengawasan atas layanan dan tingkat kepuasan kepada pengunjung. Adanya tempat berjualan ini juga akan memberi kesempatan kepada kami untuk berkembang secara sama dan wajar, memberi kontribusi pada PAD dan melakukan pencatatan melalui parkir yang masuk sehingga pemerintah memiliki data tentang jumlah pengunjung secara pasti. Jika semua itu ada, tinggal kami melakukan hal terbaik kepada pengunjung agar mereka dapat kemari terus dan setiap berkunjung kemari tentu akan mengunjungi warung kami ini.

Gambar 5.1

Kondisi Warung di Destinasi Natuna, Dibangun pedagang untuk mengundang pengunjung agar jajan ke warung mereka bukan untuk mengunjungi destinasi



Sumber: Photo oleh peneliti, November 2018.

Meskipun Peinda Natuna belum melakukan pembenahan terhadap Kawasan Destinasi, tetapi telah ada pemerintah desa yang melihat keunggulan kompetitif ini dengan menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur kepariwisataan daerah. Salah satunya di Desa Pengadah, sekitar 23 Km dari Ranai. Salah satu keunggulan kompetitif desa ini adalah memiliki sungai dalam yang terhubung ke laut dan di sana tumbuh tanaman mangrove sebagai tempat bermukim komoditi kepiting air payau, burung dan udang. Oleh pemerintah desa, dana desa (DD) sebagian digunakan untuk membangun kawasan ini menjadi kawasan wisata khusus melalui sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

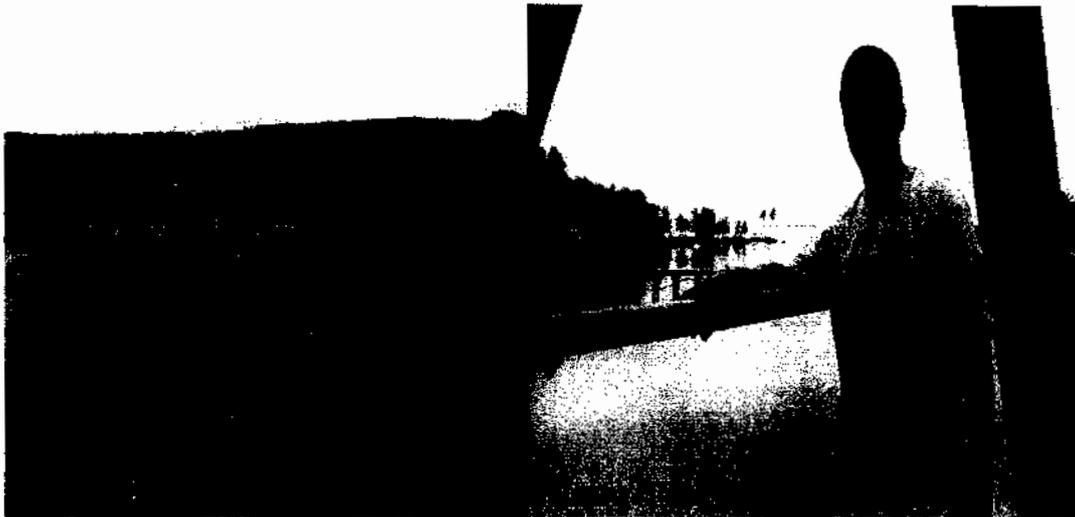
Pengunjung ke kawasan ini selain menikmati suasana alam yang sejuk bersama keluarga; dapat berlama-lama santai di gazebo sambil memesan makanan dan minuman dari kantin dengan pelayan yang bekerja sebagai karyawan pada BUMDes. Warung yang didirikan di kompleks ini adalah warung milik BUMDes dengan mempekerjakan masyarakat desa. Ketika pengunjung hendak berjalan menelusuri sungai, pengelola juga menyediakan jasa antar keliling kawasan dengan memesan tiket atau menyewa perahu bermotor yang sudah siaga dengan juru motor di destinasi ini. Hanya dengan tempo satu hingga dua jam, pengunjung sudah dapat menelusuri sungai dengan pemandangan yang tidak saja berupa hutan bakau yang indah, tetapi juga sesekali bertemu dengan kawanan kera, kepiting dan lompatan ikan yang merasa nyaman tinggal di kawasan hutan bakau milik desa ini.

Agar memastikan ekosistem sungai Pengadah tetap terjaga, pemerintah desa melalui Peraturan Daerah menetapkan hutan dan sungai di desa ini sebagai kawasan konservasi desa sehingga kegiatan masyarakat pun dibatasi. Berbagai kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan ini antara lain adalah membakar, menuba, membat pohon bakau dan berladang. Dengan larangan-larangan ini, kawasan tetap lestari dan dapat menjadi tujuan wisata bagi masyarakat sekitar Ranai.

Sementara pengunjung yang datang untuk memancing kepiting, ikan dan udang, mereka dapat menyewa sampan yang juga telah disiapkan oleh BUMDes. Ketika memancing hanya minta drop (antar) pada satu titik dalam memasuki kawasan dan meminta dijemput lagi juga boleh dan dipenuhi pengelola. Semuanya memenuhi keinginan pengunjung. Biasanya, memancing yang terdiri dari beberapa orang (antara 4 sd 8 orang) lebih memilih menyewa perahu bermotor. Sementara memancing yang datang sendiri atau dua orang lebih memilih menyewa perahu tanpa mesin yang juga telah

disediakan oleh BUMDesa. Harga sewa, baik perahu bermotor maupun perahu tanpa motor juga sangat terjangkau, meskipun pengunjung dengan minat khusus ini dapat membayar lebih dari tarif yang ditentukan.

Gambar 5.2
Objek Wisata Desa Pengadah



Sumber: Photo oleh Penulis, 2018

Sementara di bibir pantai, BUMDes juga telah menata kawasan pantai menjadi lokasi bermain bagi pengunjung. Pantai pasir yang bersib dengan ombak yang besar menjadi daya tarik pengunjung untuk bermain pelampung karet, berenang dan berlari. Objek wisata bahari dengan minat khusus ini pun selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada sore hari dan bahkan hingga malam hari. Sementara pada hari libur, pengunjung biasanya memesan tempat dan sampan beberapa hari sebelum hari H.

Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pengadah di atas merupakan implementasi mini dari perencanaan pariwisata. Kepala Desa tidak dengan serta merta dapat menggunakan dana dari DD untuk membangun kompleks ini. Tentu ada satu proses yang dilakukan dari bawah, disalurkan melalui perencanaan dan kemudian dianggarkan

mengikuti porsi atau kapasitas keuangan desa. Petikan wawancara dengan Kades Pengadah membuktikan hal ini:

Sudah lama saya memikirkan ini. Ketika dilantik menjadi Kepala Desa Pengadah beberapa tahun lalu dan kemudian ada kabar pemerintah desa akan memperoleh dana desa (DD) sebesar Rp 1.4 M per tahun, saya pun melontarkan ide untuk membangun Kawasan Sungai Pengadah ini menjadi objek wisata. Apalagi, menurut aturan, DD harus juga dapat dilekatkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan informasi ini, saya menggiring ide ini agar dapat diterima oleh masyarakat. Pada tahun pertama penerimaan DD, ide ini tidak dapat direalisasikan, tetapi sosialisasi kepada masyarakat sudah viral, dan akhirnya melalui DD tahun ketiga, rapat desa menyepakati untuk membangun kawasan Sungai Pengadah ini menjadi objek wisata. Semua komponen masyarakat pun setuju; begitu juga pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) menyatakan kesetujuannya sehingga semua maju dan bergerak mewujudkan kawasan ini. Inilah, yang kemudian dapat diwujudkan dan dapat dinikmati tidak saja oleh masyarakat sini, tetapi juga oleh pihak lain yang berkunjung ke objek wisata ini.

Ketika pemerintah sudah merencanakan sesuatu dengan baik, maka rencana itu dapat segera direalisasikan sebagaimana cerita objek wisata di Desa Pengadah ini. Dalam rangka itu pula, Kementerian Pariwisata RI telah mewajibkan pemma kabupaten dan kota serta provinsi untuk menentukan lima destinasi unggulan pilihan untuk pengembangan destinasi daerah dalam kerangka destinasi nasional. Untuk memilih itu, ternyata melahirkan kebimbangan pemerintah daerah. Ada rasa ketidak-adilan ketika suatu destinasi ditetapkan sebagai destinasi unggulan, sementara destinasi lainnya tidak, padahal diantara destinasi itu memiliki karakteristik dan kesetaraan termasuk kemungkinan berkembang. Namun, mengingat ini adalah amanat peraturan, maka pemerintah Kabupaten Natuna harus melakukan ini dengan menentukan lima destinasi unggulan dan mengedepankan pengembangan lima destinasi itu untuk lima tahun ke depan. Putusan itupun belum diambil oleh pemerintah daerah dan oleh karena itu, melalui riset ini, saya mengusulkan agar Pemda Natuna melakukan pilihan atas lima destinasi unggulan daerah berikut ini: Batu Kapal, Wisata Agro Ceruk, Pantai Batu Kasah, Pulau Sedanau dan Pulau Sekatung.

Salah seorang aparatur di Kabupaten Natuna yang penulis temui pun menyarankan hal yang sama. Menurutnya:

“Saya setuju ketika pemerintah menentukan lima destinasi utama sebagai titik awal pergerakan pembangunan destinasi di Kabupaten Natuna ini. Mengapa Alif Stone tidak dipilih, saya paham karena destinasi itu sudah diserahkan ke pihak investor; begitu juga Pulau Senua yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh BKSDA Pusat sehingga pemda memiliki akses terbatas pada kedua kawasan itu ketika hendak mengembangkannya menjadi destinasi unggulan daerah. Biarlah kedua destinasi itu disenergikan dengan lima destinasi unggulan pilihan pemda. Selain memilih lima destinasi unggulan daerah, saya mengusulkan agar Masjid Raya Natuna juga dipilih sebagai destinasi wajib sehingga Pemda memiliki 6 destinasi unggulan. Di kompleks masjid Raya ini semestinya dikembangkan sebagai pusat peradaban, ilmu pengetahuan dan bisnis syariah mengingat bangunan di komplek ini saling terpisah sehingga keberadaan berbagai pusat tersebut tidak mengganggu masyarakat yang melakukan ibadah”

1.2 Perencanaan Program Pengembangan Destinasi Wisata

Program pembangunan destinasi pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai wujud pengejawantahan strategi pembangunan destinasi pariwisata dan rencana pengembangan kawasan pariwisata yang telah ditetapkan. Program pembangunan destinasi pariwisata memiliki fungsi:

- 1) Sebagai dasar untuk mengembangkan berbagai kegiatan pembangunan yang lebih rinci untuk destinasi pariwisata;
- 2) Sebagai acuan dasar pelaksanaan strategi pembangunan perwilayahan pariwisata;
- 3) Sebagai acuan dasar pelaksanaan strategi pengembangan produk pariwisata (daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, sistem jaringan transportasi);
- 4) Sebagai acuan dasar pelaksanaan strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
- 5) Sebagai acuan dasar pelaksanaan strategi pengembangan investasi pariwisata.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan destinasi pariwisata nasional, rencana pengembangan destinasi daerah hendaknya memuat:

- 1) Judul program pembangunan destinasi pariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan destinasi pariwisata provinsi atau kabupaten/kota;
- 2) Indikasi kegiatan pembangunan destinasi pariwisata;
- 3) Waktu pelaksanaan program pembangunan destinasi pariwisata;
- 4) Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program; dan
- 5) Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan panduan ini, maka dokumen perencanaan pengembangan pariwisata yang dibutuhkan di Kabupaten Natuna agar nyambung dengan system perencanaan ditingkat Provinsi dan Pusat dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 5.2
Dokumen Perencanaan Yang Diperlukan Pemda Dalam Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Destinasi Wisata

NO	PROGRAM DAN INDIKISI DAN KEGIATAN	PAGU/PAKET	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PROGRAM
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4								5
PERWILAYAHAN DAERAH DAN PENENTUAN DESTINASI DALAM RTRW KABUPATEN											
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Natuna melalui Perda.	1	X	X							Dinas Pariwisata
2	Penguatan dan Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Natuna dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Natuna melalui Perda.	1	X	X	Dinas Pariwisata
PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA											
1	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Wisata Unggulan.	1	X	X	Dinas Pariwisata

2	Penyusunan Rencana Detil Pembangunan Destinasi Wisata.	1	x	x	Dinas Pariwisata
3	Penyusunan rancangan peraturan dan pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Objek Daya Tarik Wisata Prioritas.	1	x	x	Dinas Pariwisata
4	Penyusunan regulasi, tata tertib dan sistem keamanan di destinasi.	1	x	x	Dinas Pariwisata
5	Penyebarlusan informasi dan publikasi Peraturan tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata.	1	x	x	Dinas Pariwisata
6	Penyusunan deskripsi detail kegiatan aksi sapta pesona pada destinasi unggulan kabupaten dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan.	1	x	x	Dinas Pariwisata
7	Penguatan konektivitas antar destinasi melalui penyusunan paket wisata dengan stakeholder.	9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata
8	Inovasi manajemen atraksi dan pengembangan even wisata rutin untuk menarik kunjungan wisata.	9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata
PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM & FASILITAS PENDUKUNG PARIWISATA													
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	9		x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata dan Dinas PU
2	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.	8		x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinas PU, PDAM, PLN dan Diskominfo
3	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.	1	x	x	Dinas Pariwisata

4	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) yang terintegrasi dengan ODTW.	1	X	X	Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian
5	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.	1	X	X	Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan
6	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (early warning system) di destinasi pariwisata	1	X	X	Dinas Pariwisata, Dinas Kesbangpol, BPBD, BKSDA
7	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.	1	X	X	Dinas Pariwisata, Dinas Kesbangpol, BPBD, BKSDA
8	Penyediaan fasilitas olah raga, jogging track, wahana permainan, pedestrian, fasilitas parkir, sanitasi dan fasilitas kebersihan di destinasi wisata.	5	X	X	X	X	X	Dispar, Dinas PU, PDAM, PLN dan Diskominfo
9	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	3	X	X	X	Dinas Pariwisata, Dinas Perijinan Terpadu dan BKSDA
PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI INTERNAL & EKSTERNAL UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN												
1	Peningkatan ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata mengikuti standar nasional.	9	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Dishub
2	Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di destinasi pariwisata.	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Dishub

3	Pengembangan dan atau peningkatan kerjasama antar maskapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di pasar utama dengan tetap memperhatikan kepentingan kedaulatan negara, kepentingan ekonomi nasional dan kelangsungan badan usaha angkutan udara nasional.	8	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata dan Dishub
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS UMUM BESERTA KONEKTIVITASNYA													
1	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	3	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Perijinan Terpadu dan BKSDA
2	Pengembangan dan atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan) antara destinasi pariwisata serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.	8	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata dan Dishub
LINGKUNGAN TERKAIT PARIWISATA													
1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam, hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	3	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Perijinan Terpadu dan BKSDA
2	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi wisata.	8	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata, Dishub dan BPS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													

1	Kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha pelaku usaha dalam industri pariwisata.	6	.	.	.	X	X	X	X	X	X	Dispar, Disdag, Dinas Perindustrian dan Dinsos dan Dinas UMKM
2	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skema insentif.	6	.	.	.	X	X	X	X	X	X	Dinas Pariwisata dan Kantor Imigrasi
3	Pembentukan dan penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di sekitar ODTW.	6	.	.	.	X	X	X	X	X	X	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
PEMBERDAYAAN INVESTASI PARIWISATA												
1	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata.	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dinas Pariwisata, Dishub dan BPS
2	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi-destinasi pariwisata.	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dinas Pariwisata, Dishub dan BPS
3	Peningkatan road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial.	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dinas Pariwisata, Dishub, BPS dan Dinas Perijinan Terpadu

Sumber : Peneliti 2019

1.3 Perencanaan Program Pembangunan Industri Wisata

Program pembangunan industri pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pembangunan industri pariwisata yang telah ditetapkan. Program pembangunan industri pariwisata memiliki fungsi:

- 1) Sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pembangunan struktur industri pariwisata;
- 2) Sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan kemitraan industri pariwisata;

- 3) Sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan industri kecil, menengah, maupun besar yang mendukung pariwisata; dan
- 4) Sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pengelolaan industri pariwisata yang memenuhi standar-standar pelayanan nasional dan internasional.

Perencanaan program pembangunan industri pariwisata di satu kabupaten hendaknya memuat paling tidak lima hal berikut:

- 1) Judul program pembangunan industri pariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan industri pariwisata;
- 2) Indikasi kegiatan pembangunan industri pariwisata;
- 3) Waktu pelaksanaan program pembangunan industri pariwisata;
- 4) Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program; dan
- 5) Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.

Secara lengkap, kebutuhan dokumen perencanaan pariwisata di bidang ini dapat diringkas dalam table berikut ini :

Tabel 5.3
Dokumen Perencanaan Yang Diperlukan Pemda dalam Program
dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Industri Pariwisata

NO	PROGRAM	PAGU / PAKET	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PROGRAM	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4								5	
STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA												
1	Penguatan koordinasi antara pemerintah, investor dan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata.	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dinas Pariwisata, Dishub, BPS dan Dinas Perijinan Terpadu
2	Pembuatan koneksi layanan pariwisata yang terintegrasi ke dalam satu sistem.	3	.	X	.	.	.	X	.	.	X	Dinas Pariwisata, Dishub, BPS dan Dinas Perijinan Terpadu
PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA												
1	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.	3	.	X	.	.	.	X	.	.	X	Dinas Pariwisata, Dishub, BPS dan Dinas Perijinan Terpadu
2	Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.	3	.	X	.	.	.	X	.	.	X	Dinas Pariwisata, Dishub, BPS dan Dinas Perijinan Terpadu

3	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat sistem pengelolaan destinasi pariwisata.	3	.	X	.	.	.	X	.	.	X	Dinas Pariwisata, Dishub, BPS dan Dinas Perijinan Terpadu
4	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak – anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan IKM dan usaha pariwisata skala UMKM.	3	.	X	.	.	.	X	.	.	X	Dinas Pariwisata, Dishub, BPS dan Dinas Perijinan Terpadu serta Dinas Koperasi UMKM
PENINGKATAN KREDIBILITAS BISNIS INDUSTRI PARIWISATA												
1	Membangun jaringan layanan pariwisata terpadu dengan industri pariwisata yang kredibel diantaranya dengan agoda, traveloka dll	3	.	X	.	.	.	X	.	.	X	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM
2	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.	3	.	X	.	.	.	X	.	.	X	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM

3	Standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	3	.	x	.	.	.	x	.	.	x	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM
4	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.	3	.	x	.	.	.	x	.	.	x	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM
5	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	3	.	x	.	.	.	x	.	.	x	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM dan Dinkes
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH MASYARAKAT DI BIDANG PARIWISATA												
1	Peningkatan keterlibatan usaha mikro, kecil, menengah masyarakat dalam kegiatan pameran dan promosi hasil industri daerah.	3	.	x	.	.	.	x	.	.	x	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM
2	Peningkatan ketersediaan hasil industri usaha mikro, kecil, menengah di lokasi-lokasi destinasi wisata.	3	.	x	.	.	.	x	.	.	x	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM

3	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	3		x				x			x	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM
PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA												
1	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
2	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan green economy.	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
3	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social responsibility (CSR) untuk mendorong tumbuh kembangnya IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
PENGENDALIAN PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA DALAM RANGKA MEMBANGUN IKLIM PERSAINGAN YANG SEHAT												

1	Pengendalian usaha pariwisata untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat.	8	.	x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
2	Peningkatan insentif, pembinaan dan pengendalian kepada pelaku usaha masyarakat di sekitar destinasi wisata.	8	.	x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag

Sumber : Peneliti, 2019

1.4 Perencanaan Program Pembangunan Pemasaran Wisata

Program pembangunan pemasaran pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pemasaran pariwisata yang telah ditetapkan. Program pembangunan pemasaran pariwisata memiliki fungsi:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata;
- 2) Sebagai acuan dasar dalam pembangunan citra destinasi pariwisata;
- 3) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- 4) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi bauran pemasaran pariwisata daerah, yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada produk, distribusi, dan promosi.

Program pembangunan pemasaran pariwisata dirumuskan berdasarkan pada Strategi pemasaran pariwisata; dan tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah dan

lembaga lain yang terkait dengan pemasaran pariwisata. Program pembangunan pemasaran pariwisata memuat:

- 1) Judul program pembangunan pemasaran yang mendukung implementasi strategi pengembangan pemasaran pariwisata;
- 2) Indikasi kegiatan pembangunan pemasaran pariwisata;
- 3) Waktu pelaksanaan program pembangunan pemasaran pariwisata;
- 4) Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program;
- 5) Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.

Tabel 5.4
Dokumen Perencanaan Yang Diperlukan Pemda dalam Program
dan Indikasi Kegiatan Pemasaran wisata

NO	PROGRAM	PAG U/ PAK ET	TAHUN							PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PROGRAM		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)							(5)		
PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN WISATA												
SEGMENTING, TARGETING, POSITIONING												
1	Pengembangan pasar sasaran (target market) yang tepat bagi produk wisata dengan positioning "minat khusus" berda-sarkan pendekatan variabel segmentasi: geografis, sosiodemografis, produk yang terkait (related product), motivasi perja-lanan, psikografis (gaya hidup), behaviour-usage frequency, behaviour-usage occasion, travel trade, meeting, incentive, conference, and exhibition (MICE) melalui market research yang terfokus pada segmen-segmen tertentu.	3		x					x		x	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM

2	Memposisikan keunikan flora dan fauna endemic sebagai icon wisata minat khusus.	3	.	x	.	.	.	x	.	.	x	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM
BAURAN PEMASARAN												
1	Pengembangan paket wisata yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	8	.	x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
2	Memasukkan berbagai even wisata daerah ke dalam kalender pariwisata nasional.	8	.	x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
3	Intensifikasi dan ekstensifikasi promosi paket wisata.	8	.	x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
4	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: theme park).	8	.	x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag

5	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (community marketing), melalui: Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, bulletin organisasi, dan lain-lain). Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain).	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
6	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada destination image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
7	Peningkatan kualitas websites pariwisata hingga pada level transaksi.	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
8	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui on-line portals.	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
9	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa (local, nasional, dan internasional).	8	.	X	X	X	X	X	X	X	X	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag

KEMITRAAN PEMASARAN												
1	Penerapan relasi dengan pelanggan (customer relationship) melalui agen perjalanan wisata di daerah asal wisatawan.	3		x				x			x	Dinas Pariwisata, Dishub, Dinas Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM
2	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
3	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag, Kantor Imigrasi, Bea Cukai dll
RANCANGAN SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN												
1	Pembuatan Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Natuna	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag, BPS
2	Pembuatan dan penerbitan berkala buku statistik pariwisata daerah (cetak dan on line).	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag dan BPS
3	Pembuatan dan penerbitan buku saku pariwisata daerah.		<	<	<	<	<	<	<	<	<	
SISTEM EVALUASI KEBERHASILAN PEMASARAN PARIWISATA												
1	Pelaksanaan tracer kepuasan wisatawan	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag dan BPS

2	Membangun sistem penanganan keluhan wisatawan.	8	.	x	x	x	x	x	x	x	x	Dispar, Dinsos, Dinas UMKM; Disdag
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

Sumber : *Peneliti, 2019*

1.5 Program Pembangunan Kelembagaan dan Sumberdaya Kepariwisata

Program pembangunan kelembagaan dan sumberdaya kepariwisataan merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang telah ditetapkan.

Program pembangunan kelembagaan dan sumberdaya kepariwisataan memiliki fungsi:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan sumber daya kelembagaan dan pemanfaatan anggaran yang terbatas;
- 2) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat; dan
- 3) sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perencanaan dan pembangunan fisik, serta pembinaan karir di bidang kepariwisataan.
- 4) Pelibatan masyarakat dalam industri kepariwisataan
- 5) Peluang investasi kepariwisataan
- 6) Konsep penelitian dan pengembangan kepariwisataan

Program pembangunan kelembagaan dan sumberdaya kepariwisataan dirumuskan berdasarkan strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan; Isu-isu pengembangan kelembagaan kepariwisataan; dan tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan pengembangan kelembagaan

kepariwisataan. Program pembangunan kelembagaan dan sumberdaya kepariwisataan memuat:

- 1) Judul program pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang mendukung implementasi strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- 2) Indikasi kegiatan pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
- 3) Waktu pelaksanaan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
- 4) Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program;
- 5) Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.

Tabel 5.5
 Dokumen Perencanaan Yang Diperlukan Pemda dalam Program
 dan Indikasi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

NO	PROGRAM	PAGU / PAKET	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PROGRAM	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	(2)	(3)	(4)								(5)	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KELEMBAGAAN PARIWISATA												
1	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral.	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Semua OPD se Kab. Natuna
2	Penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan (dalam luar daerah).	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata
3	Penguatan fungsi koordinasi, integrasi, sinergi dan program antar level pemerintahan dalam pengembangan pariwisata.	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Semua OPD se Kab. Natuna

4	Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Semua OPD se Kab. Natuna
5	Pengembangan penelitian tentang	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata
PENGEMBANGAN ORGANISASI UNTUK Mendukung Pariwisata												
1	Pembentukan Badan Promosi Pariwisata	8		x	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
2	Pembentukan GIPI (Gabungan Industri)	8			x	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
3	Pelatihan peningkatan kapasitas	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata
4	Fasilitasi pengembangan sarana	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata
REGULASI IKLIM Kondusif bagi Investor untuk Pariwisata												
1	Pengembangan sistem dan mekanisme	8		x	x	x	x	x	x	x	x	Dinas Pariwisata
2	Penyusunan Perda tentang investasi	1		-	-	-	-	-	x	-	-	Dinas Pariwisata
3	Penetapan jasa profesional pemandu wisata	1		-	-	-	-	-	x	-	-	Dinas Pariwisata

4	Fasilitasi kemudahan mendapatkan	3	-	X	-	-	-	-	X	-	X	Dinas Pariwisata, Bank Operasi
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PARIWISATA												
1	Peningkatan kemampuan perencanaan	3	-	X	-	-	-	-	X	-	X	Dinas Pariwisata dan Bappeda
2	Peningkatan kecakapan manajerial dan											
	a. Pendidikan formal lanjut bagi pegawai	3	-	X	-	-	-	-	X	-	X	Dinas Pariwisata dan BPP
	b. Pengembangan kemampuan	3	-	X	-	-	-	-	X	-	X	Dinas Pariwisata dan Bappeda,
	c. Pelatihan promosi dan pemasaran.	3	-	X	-	-	-	-	X	-	X	Dinas Pariwisata
3	Pemetaan kompetensi, standardisasi	3	-	X	-	-	-	-	X	-	X	Dinas Pariwisata
4	Penguatan kompetensi manajerial dan											
	a. Pengembangan pendidikan/p											
	b. Pelatihan softskills (PR-ing, negosiasi,											
	c. Pelatihan teknologi informasi dan											
	d. Pelatihan kewirausahaan berbasis											

Sumber : Peneliti, 2019

B. Koordinasi dan koneksi perencanaan antara dinas pariwisata dengan SKPD lainnya terutama dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kepariwisataan Daerah.

Pembangunan infrastruktur kepariwisataan oleh pemerintah menjadi kunci atas keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan. Keberadaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, kelistrikan, air bersih dan telekomunikasi di daerah tujuan wisata, dapat mengundang kedatangan turis untuk berkunjung ke satu destinasi. Selain fasilitas daerah sebagaimana disebut di atas, tidak ketinggalan adalah pembangunan fasilitas hotel dan restoran yang menjadi salah satu infrastruktur penunjang pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, yang mana keberadaan infrastruktur ini dapat dilakukan oleh swasta

Setelah hotel-hotel yang bagus dan berbintang terbangun, persoalan pengembangan destinasi masih belum selesai, karena harus diiringi dengan pelayanan prima kepada wisatawan agar memberikesan baik dan memberikan kenyamanan bagi mereka. Dan bukan tidak mungkin, wisatawan yang pernah berkunjung tersebut akan menyampaikan ke keluarga, kerabat dan teman-temannya untuk kembali berwisata ulang dengan membawa rekan dan sahabat dan handai taulan itu.

Pariwisata memiliki kepentingan yang sangat kompleks antar sektor dan antar pelaku. Dalam kondisi yang demikian, maka terdapat kebutuhan koordinasi yang semakin tinggi pula. Salah satu penyebab kegagalan pembangunan kepariwisataan di masa lalu antara lain disebabkan kurang disadarinya hakekat kepariwisataan dan produk pariwisata. Sebagai barang campuran, produk wisata

hendaknya dibangun berdasarkan peran yang seimbang antar pihak-pihak yang menjalankan posisi kunci, terutama oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sebuah perencanaan pariwisata yang baik membutuhkan tahapan-tahapan yang dapat digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan perencanaan serta mampu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa pendekatan ditawarkan dalam mencermati tahapan dari perencanaan pariwisata seperti ditawarkan oleh Acerenca (dalam Pearce, 1998:246-247) dengan menerapkan perencanaan strategis dalam pariwisata yang menempatkan perencanaan sebagai pendekatan awal dalam upaya pengembangan pariwisata. Secara umum tahapan yang disarankan oleh tersebut dimulai dari tahapan analisis yaitu dengan melihat bagaimana kondisi pengembangan pariwisata yang ada sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap bagaimana posisi kepariwisataan saat ini. Tahapan ketiga adalah dengan melakukan perumusan kebijakan pariwisata yang dilanjutkan dengan mendefinisikan strategi pengembangan. Tahapan terakhir adalah dengan melakukan elaborasi dari bagaimana program dilaksanakan.

Jika diperhatikan dengan seksama terlihat bahwa pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pariwisata dibagi ke dalam lima tahapan. Tahapan-tahapan yang diajukan yaitu:

1. Melakukan inventarisasi mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki.
2. Menaksir pasaran pariwisata dan mencoba melakukan proyeksi lalu lintas wisatawan pada masa yang akan datang.
3. Memperhatikan di belahan dunia mana permintaan (demand) lebih besar dari pada persediaan atau penawaran.

4. Melakukan penelitian kemungkinan perlunya penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing.
5. Melakukan perlindungan terhadap kekayaan alam yang dimiliki dan memelihara warisan budaya bangsa serta adat istiadat suatu bangsa yang ada.

Koordinasi yang berlangsung pada tahap perencanaan masih belum begitu baik. Hal tersebut bermula dari kelemahan di pihak Disbudpar sendiri yang tidak menginformasikan secara detil program dan kegiatan yang akan dilakukan, serta apa yang harus dilakukan oleh SKPD lainnya untuk menunjang program atau kegiatan kepariwisataan agar berjalan baik. Salah seorang informan dari Bappeda menuturkan bahwa:

"Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pembangunan di bidang kepariwisataan diantaranya adalah SKPD yang berjalan sendiri-sendiri dan Dinas Pariwisata tidak menginformasikan secara detil apa yang harus dilakukan oleh SKPD lainnya. Akibatnya, program dan kegiatan berjalan seperti terlepas dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Bappeda fungsinya sebagai koordinator saja. Koordinasi adalah kelemahan utama kita selama ini. Dukungan terhadap sektor-sektor yang diunggulkan tidak terlalu kelihatan, sehingga upaya yang harus dilakukan dan dimasukkan ke dalam usulan Musrenbang semestinya dimulai dari bawah. Kalau di level perencanaan saja masih terdapat kelemahan sehingga implementasi koordinasi di level pelaksanaannya sangat rendah".

Dalam konteks perencanaan kegiatan, selama ini diakuinya bahwa tidak terdapat pembahasan yang mempertemukan SKPD dengan sektor pariwisata dalam tingkat perencanaannya. Dan bahkan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) pun belum ada yang seharusnya dijadikan sebagai panduan perencanaan berbagai kegiatan di Disbudpar, dengan demikian, arah pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Natuna ini dilakukan tidak memiliki pedoman.

Perencanaan yang tidak mengacu pada dokumen, belum mempunyai kekuatan hukum dari sisi yuridis. Pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah tidak cukup dengan hanya berbekal sebuah Rencana Strategis SKPD karena

renstra dianggap belum sempurna sebagai sebuah perencanaan strategis yang fiks untuk pembagunan dan pengembangan kepariwisataan daerah. Renstra SKPD yang baik diturunkan dari RPJMD dan RPJPD; sementara RIPPARDA disusun dengan mengacu kepada dua dokumen di atas. Strategi pencapaian per periode dilengkapi dengan Renstra. Kondisi pelibatan SKPD lain dalam perencanaan pembangunan pariwisata terungkap dalam hasil wawancara dengan informan dari BAPPEDA berikut ini:

“Pembahasan tentang rencana program pembangunan bidang kepariwisataan masih tidak sempurna. Banyak SKPD yang tidak dilibatkan, padahal pariwisata sebagai sebuah aksi Bersama yang semestinya melibatkan banyak SKPD. Akibatnya, banyak kelemahan yang terjadi dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata. Indikatornya saja banyak yang tidak pas, sehingga kita tidak terlalu yakin tingkat kehenarannya sebagai dokumen rencana yang layak dijadikan sebagai acuan. Sementara itu di sisi lain kurangnya kaordinasi dalam perencanaan anggaran seringkali membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seakan-akan “dipaksa” menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Akibatnya capaian kegiatan tidak bisa dilakukan dengan baik, karena pelaksana kegiatan harus mencari jalan bagaimana menyiasati keterbatasan anggaran di satu pihak, dan mencoba mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Kebingungan ini tidak hanya datang dari SKPD di luar Dinas Pariwisata; mereka yang berasal dari Dinas pun mengalami kebingungan untuk melakukan apa akibat tidak ada perencanaan. Berikut ini hasil investigasi riset kepada salah seorang informan dari dalam; dengan mengatakan

“Kami sering bingung melaksanakan kegiatan, tetapi karena sudah dijadikan kalender tahunan mau tidak mau harus tetap dilaksanakan. Pernah ada kegiatan festival yang pesertanya dari kabupaten/kota, tetapi ternyata tidak ada uang penginapan di anggarannya. Kan kasihan lihat anak-anak yang datang, padahal mereka datang dari pulau.” Hal semacam ini terjadi karena koordinasi perencanaan Disbudpar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak berjalan dengan baik”.

Ketika koordinasi tidak baik, yang biasa terjadi adalah pemangkasan anggaran sehingga terjadi masalah saat implementasi di kemudian hari. Pernah anggaran yang sudah disahkan tapi kemudian keluar surat yang menyatakan bahwa

kegiatan-kegiatan tertentu ditunda pelaksanaannya. Dan ketika keluar surat lagi bahwa kegiatan sudah bisa dilaksanakan, kegiatannya sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena waktu yang terbatas. Dari sisi mekanisme pembahasankegiatan, terdapat beberapa kelemahan yang seharusnya tidak perlu terjadi pada sektor pariwisata yang secara jelas sudah dijadikan sebagai sektor unggulan.

Dengan status sebagai sektor unggulan selayaknya pariwisata mendapatkan perhatian yang lebih memadai terutama dalam bentuk sinergi yang dapat dimulai pada saat perencanaan kegiatan-kegiatan berlangsung. Institusi perencana seperti Bappeda dan Disbudpar (dalam struktur organisasi Disbudpar terdapat Bidang Perencanaan yang dikepalai oleh seorang pejabat eselon 3 dan eselon 4 seyogyanya mengambil peran aktif untuk mensinergikan berbagai kegiatan SKPD ke arah dukungan terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai destinasi unggulan.

Perencanaan pariwisata oleh pemerintah memainkan peran yang penting karena tanpa perencanaan pariwisata, program dan kegiatan akan dapat kehilangan kendali, tidak memiliki arah, serta kehilangan daya rekat antar elemen-elemen institusional perencana. Rencana induk atau RIPPDA itulah yang seharusnya merupakan dasar perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan industry pariwisata. Di samping itu sinergi stakeholder dalam perencanaan yang meliputi prakondisi perencanaan, perumusan rencana, serta implementasi dan evaluasi berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kepariwisataan suatu daerah di masa berikutnya.

Untuk melengkapi data dasar objek daya tarik wisata (ODTW) dan untuk kebutuhan koordinasi dengan SKPD yang lainnya; Dinas Pariwisata semestinya membuat database ODTW yang di dalamnya terdapat informasi detail dari keberadaan ODTW. Ketika data dasar dari ODTW ini dapat dihadirkan, maka tidak

hanya SKPD saja yang dapat melengkapi kebutuhan ODTW sesuai kewenangan yang diberikan.

Pembangunan ODTW tidak akan selesai ketika hanya digarap oleh Dinas Pariwisata. Bisnis pariwisata selalu terhubung dengan banyak pihak sehingga data dasar keberadaan sebuah ODTW menjadi penting dipersiapkan untuk kebutuhan perencanaan dan pengembangannya.

Tabel 5.6
Form Kebutuhan Data Dasar Deskripsi Pengembangan Destinasi

Nama ODTW
Lokasi ODTW	
Jenis Objek	
Deskripsi Objek	
Daya Tarik	
Keunikan dan Kelangkaan	
Keragaman Daya Tarik	
Aksesibilitas	
Kualitas jalan menuju objek	
Kualitas jalan di dalam objek	
Ketersediaan moda angkutan	
Kemudahan pencapaian, waktu tempuh dan ketersediaan	
Rambu-rambu petunjuk arah	
Sarana dan Prasarana	
Jalan Menuju Destinasi	
Warung makanan	
Kamar mandi / toilet di ODTW	
Toko Cideramata	
Listrik	
Telepon	
Penginapan / Hotel	
Tempat Hiburan	
Karcis masuk	
Aspek Pasar:	
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata rata-rata per bulan	
Investasi yang sudah ada di ODTW	
Skala Jangkauan Pemasaran	

Kelembagaan:	
Pengelolaan objek saat ini	
Permasalahan	
Permasalahan mendasar di perhatikan dan perlu segera ditangani	
Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	

Sumber: Penulis, berdasarkan banyak rujukan, 2019.

Setelah data dasar sebagaimana table di atas terpenuhi, ruaka informasi ini tidak boleh tersimpan rapi di kantor, melainkan diunggah ke media. Dengan demikian, seiring perjalanan waktu, kebutuhan destinasi akan dapat dilengkapi ketika sebuah destinasi dibuka dan pengelola mendapat masukan mengenai kelengkapan destinasi. Informasi detil tentang keberadaan ODTW dengan mengikuti table di atas untuk semua ODTW di Kabupaten Natuna perlu dibuat oleh Dinas Pariwisata sehingga keberadaan ODTW selain tersampaikan ke public; juga dapat digunakan untuk kebutuhan perencanaan penguabngnan destinasi.

C. Strategi pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam indutri pariwisata daerah agar terintegrasi dalam Sistem Kepariwisata Nasional.

Berbicara strategi yang digunakan dalam mengembangkan atau mempertahankan suatu kondisi yang baik atau lebih baik maka sudah barang tentu terkait dengan Keunggulan yang kompetitif, artinya pada bagian ini lebih mengarah kepada strategi yang harus digunakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam melibatkan Masyarakat dan Pengusaha untuk mengembangkan Destinasi Wisata yang ada, yang dianggap bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Kegiatan pariwisata dapat diadakan hanya satu kali dan dapat juga diadakan secara regular. Baik kegiatan sekali maupun regular selalu berkaitan erat dengan promosi dan pemasaran daerah. Sejak beberapa dekade terakhir, jumlah festival dan *special event* meningkat dengan pesat, di mana hal ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara even untuk membagi kebudayaan lokal mereka kepada pengunjung luar daerah. Apa yang menarik dari kegiatan pariwisata seperti festival musik atau karnaval? Yang jelas pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang unik dalam waktu bersamaan. Hal ini tentu disebabkan karena acara semacam ini bukanlah atraksi wisata yang bisa dikunjungi dan ditonton tiap hari, melainkan diadakan di luar program wisata atau kegiatan wisata normal lainnya.

Natuna mulai bersiap mendatangkan wisatawan mancanegara. Untuk tujuan ini, sebanyak enam event kepariwisataan daerah akan ditampilkan mulai tahun 2019. Atraksi-atraksi tersebut akan dipadukan dengan keindahan nature dan culture Natuna yang luar biasa. Sebagai daerah yang berada di cross border laut, wisatawan asal Singapura dan Malaysia menjadi target utama untuk kegiatan Natuna, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Buralimar, dalam sebuah wawancara dengan penulis tentang Event Wisata Natuna mengatakan bahwa:

"Pariwisata Natuna tetap eksis dan jadi bagian penting Kepri. Potensi wisata Natuna sangat besar. Alam dan budaya sangat bagus. Kehadiran event unik dan menarik yang digelar Natuna tentu akan jadi daya tarik terbaik. Apalagi, variasinya sangat besar. Pastikan Natuna tetap jadi pilihan berlibur".

Dari agenda yang selalu dilakukan setiap tahun, paling tidak tercatat beberapa agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten

Natuna; diantaranya adalah Festival Semarak Lebaran, Festival Musik Sahur, Festival Lampu Colok/Litou. Kegiatan di atas mewakili nuansa religi Kabupaten Natuna. Satu diantara event di atas, yakni Lampu Colok/Litou sudah sangat familiar di mancanegara; terutama Malaysia dan Singapura.

Usai event di atas, masih ada Festival Pulau Senua yang sekaligus Sail to Natuna. Festival Pulau Senua bisa dinikmati mulai 16 Juni 2019. Festival ini memiliki sembilan sub event. Komposisi lombanya terdiri dari Kolek, Fotografi, Renang, Kuliner, dan Bercerita. Ada juga Inflatasi Karang, Aksi Bersih, Layang-Layang, juga Voli Pantai.

Kembali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Buralimar, dalam sebuah wawancara dengan penulis tentang Event Wisata Natuna mengatakan bahwa:

“Dengan karakternya, Natuna kuat dengan wisata baharinya. Sail to Natuna adalah program terbaik yang ditawarkan untuk mengeksplorasi potensi bahari Natuna. Event ini semakin menarik, apalagi Sail to Natuna ini dikolaborasi dengan kearifan setempat,”

Untuk Sail to Natuna, ada beberapa agenda pilihan. Program ini merilis Penyambutan Yacht dan Atraksi juga dilengkapi dengan parade kesenian dan city tour.

“Natuna tetap memunjukkan eksistensi pariwisatanya. Hal ini tentu luar biasa. Mereka tetap menyajikan event keren 2019 secara maksimal. Kami yakin, ada banyak pembaruan yang ditawarkan sepanjang tahun 2019. Yang jelas, festival yang disajikan selalu memberi experience berbeda,” jelas Deputy Bidang Pemasaran I Kemenpar Rizki Handayani Mustafa.

Natuna juga merilis *Fun Fouristic Festival*, digelar pada 27 Juli hingga 1 Agustus. *Fun Fouristic Festival* menampilkan 6 sub event. Ada Festival Lagu Melayu, Band, Burung, hingga Gasing. Dihadirkan juga Festival Nyuluh dan

Layang-Layang Tradisional plus Internasional. Semua kegiatan di atas, ingin menunjukkan bahwa Natuna merupakan destinasi liburan terbaik dalam bidang peradaban, kebudayaan dan kebaharian.

Even kepariwisataan itu juga selalu disandingkan dengan pelaksanaan expo yang digelar pada 6-12 Oktober. Dalam Natuna Expo ini selalu ditampilkan karya terbaik; diantaranya Pameran Pembangunan Natuna, Seminar Worksbop Pariwisata, hingga Festival Lagu Dangdut. Expo ini juga dikuatkan dengan warna sport tourism melalui Natuna Marathon 15 km hingga Mount Bike/Fun Bike. Lalu, CoE 2019 ditutup dengan Lomba Foto Geopark Natuna pada 30 November.

“Parade event memang baru start pertengahan 2019, tapi Natuna tidak kehilangan eksotisnya. Tetap ada banyak atraksi yang bisa dinikmati dari awal tahun 2019. Natuna ini memiliki banyak destinasi terbaik. Di sana juga ada geopark-nya akan didorong menjadi level dunia,” ujar Kabid Pemasaran Area II Asdep Pengembangan Pemasaran 1 Regional 1 Kemenpar Kiagoos Irvan Faisal.

Selain geopark, Natuna memang menawarkan banyak atraksi. Kawasan Natuna punya destinasi Pantai Batu Kasah, Batu Sindu, Pantai Sisi, Alif Stone Park, juga Pulau Senua. Ada juga destinasi Selemot di Desa Setengar, Pantai Tanjung, Pantai Teluk Buton, Pantai Sahi, Air Terjun Gunung Ranai, hingga Masjid Agung Natuna yang arsitekturnya terinspirasi dari Taj Mahal India.

Natuna juga menawarkan aksesibilitas dan amenitas yang mudah. Wilayah Natuna bisa dicapai dari jalur udara dan laut. Untuk jalur udara, wisatawan bisa memakai pesawat dari Batam ke Bandara Renai di Natuna. Maskapai yang melayani rute ini Lion Air atau Wings Air. Poros laut ada kapal ferry dari Tanjung Pinang dan Pontianak.

Menteri Pariwisata Arief Yahya memuji keseriusan Natuna memajukan sektor pariwisata. “Natuna luar biasa. Atraksi dan aksesibilitasnya mudah. Amenitasnya juga banyak pilihannya. Yang jelas harganya ramah. Jangan lupa, Natuna ini juga terkenal dengan kulinernya. Ada banyak kuliner yang hercita rasa tinggi di sana,” tuturnya.

Semua kegiatan kepariwisataan di atas selalu melibatkan masyarakat agar kegiatan kepariwisataan ini menjadi meriah. Pemda telah memutuskan untuk menarik peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan. Paling tidak terdapat multiplier efek dari penyelenggaraan kegiatan itu bagi masyarakat.

Salah satu wujud nyata keterlibatan masyarakat dalam mengelola kawasan wisata adalah badirnya koperasi yang mengumpulkan pelaku usaha dari komponen masyarakat untuk membuka dan menjalankan usaha di destinasi. Dengan demikian, destinasi tidak hanya diisi oleh pelaku usaha dari unit usaha pengelola destinasi wisata, tetapi juga datang dari masyarakat. Sebaiknya, lokasi usaha antara milik masyarakat dengan pengelola dipisah karena segmen pasar yang berbeda. Sampai saat ini, belum ada upaya ke arah itu sehingga para pelaku usaha di destinasi merupakan pemilik lahan dan penyewa lahan milik masyarakat untuk ditempati sebagai lokasi usaha. Oleh karena itu, salah seorang pelaku mengatakan bahwa:

ke depan diperlukan paling tidak kelembagaan usaha bersama yang dapat mempersatukan para pedagang yang merupakan warga local di sini yang memiliki usaha. Untung bilamana pemerintah dapat memfasilitasinya hingga menjadi koperasi berbadan hukum atau BUNDes seperti di Desa Pengadah. Rasanya, pemerintah perlu juga memperhatikan kelembagaan usaha itu agar kami bias lebih baik lagi dalam mengelola usaha.

Dari wawancara di atas, koperasi dapat saja didirikan oleh masyarakat untuk mewadahi pengelolaan kawasan wisata pada berbagai pantai yang ada di

Kabupaten Natuna. Jadi seluruh aktivitas yang ada di kawasan ini dapat dikelola melalui satu lembaga koperasi yang akan mengelola atraksi wisata ataupun kegiatan ekonomi dan sosial. Salah satu atraksi wisata yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang terkoneksi dengan agenda festival Natuna. Disini, pelaku dapat membentuk karakter, keahlian dan talenta untuk nanti ditampilkan secara maksimal dalam Festival Natuna.

Salah satu atraksi wisata yang dapat dikembangkan di kawasan pantai di Natuna ini adalah kehidupan masyarakat nelayan, olah raga volley pantai, snorkeling, diving dan selancar. Koperasi dapat menyediakan semua kebutuhan turis untuk melakukan berbagai atraksi yang tersedia di destinasi itu. Selain perahu, juga bisa menyewakan kapal motor untuk kegiatan memancing pengunjung. Setiap perahu motor diawaki oleh seorang nahkoda dan minimal seorang pembantu. Keterlibatan masyarakat di kawasan wisata seperti ini menjadi nyata, karena dari kegiatan atau atraksi wisata akan diperoleh pembayaran dan dapat diterima oleh masyarakat. Demikian juga dengan para pedagang yang berjualan di pantai ini agar diusahakan berasal dari masyarakat lokal.

Semua pedagang yang berjualan di sini adalah penduduk sini dan belum ada orang luar yang datang. Kami dulu, sekitar 10 tahun lalu hanya berjumlah 2 orang saja dan alhamdulillah kini sudah menjadi 8 orang. Berarti ada penambahan pelaku usaha. Setiap warung, mempekerjakan minimal dua orang: bisa dari anggota keluarga, dapat pula memang kita ambil orang lain untuk kerja dengan kita. Dengan demikian, pekerja di warung sini berjumlah 16 orang dari 8 pedagang tetap. Kalau hari Sabtu dan Minggu, terkadang ada pedagang dari Batam dan Pinang yang juga gelar dagangan mereka di sini.

Pedagang tetap menjual berbagai jenis dagangan seperti layang-layang, minuman dingin, es kelapa muda, kaca mata rebeu, dan berbagai jenis makanan ringan lainnya. Para pedagang ramai pada hari-hari tertentu saja, karena berdagang bukanlah mata pencaharian tetap mereka melainkan sebagai pekerjaan sampingan.

Setiap pedagang di sini, terutama pedagang kuliner adalah nelayan yang memanfaatkan waktu pada sore usai melaut. Dengan usaha kecil itu, mereka dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 650.000 s/d Rp 1.200.000 per hari Sabtu dan Minggu; sementara hari lain rata-rata hanya Rp 150.000 sd Rp 200.000. Sementara pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang pantai di sini datang dari Pinang dan Batam rata-rata durasinya seminggu; dan mereka akan berpindah ke pulau lain atau kembali ke Batam dan Pinang bilamana dagangan mereka telah habis.

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di sekitarnya. Di negara-negara maju dan berkembang pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri, sehingga masyarakat lokal yang berada di suatu destinasi pariwisata tidak terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk stakeholders dari pariwisata dan merupakan kelompok yang termarginalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata. Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada di sekitarnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Menyadari akan hal itulah, pemerintah dapat hadir dengan memberikan pelatihan dan bahkan permodalan agar secara sinergi dapat mengelola destinasi Bersama pengusaha profesional.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal tersebut dimanfaatkan oleh para pengelola wilayah yang dilindungi (protected area) dan pengusaha pariwisata untuk diikutsertakan dalam menjaga kelestarian alam dan biodiversiti daerah. Masyarakat lokal mesti terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Lebih jauh, pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti; toko kerajinan, toko cindramata (*souvenir*), warung makan dan lain-lain agar masyarakat lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

Saya merasa pemerintah belum berbuat banyak dalam mengembangkan destinasi wisata. Ini mungkin kondisi pengunjung luar yang masih sangat terbatas sehingga ketika toko kerajinan, toko cindramata (souvenir), warung makan dan lain-lain beroperasi di sini, tingkat keberlanjutan usaha masih belum pasti. Oleh karena itu, pemerintah perlu merencanakan untuk membuka akses sebanyak-banyaknya bagi kedatangan wisatawan dari nusantara dan manca. Salah satu peluang adalah perencanaan dermaga yang memungkinkan kapal pesiar datang dan berlabuh di Natuna. Ketika hanya mengandalkan penerbangan udara, maka kemungkinan kedatangan wisatawan ke Natuna akan masih sangat terbatas dan sedikit.

Sesungguhnya, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan banyak cara dan cara yang dipilih yang paling memungkinkan menggaet keterlibatan masyarakat lebih banyak (Subadra, 2006):

- a. menyewakan tanahnya kepada operator pariwisata untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik pariwisata serta turut serta memantau dampak-dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata tersebut;
- b. bekerja sebagai karyawan tetap atau paruh waktu di perusahaan operator pariwisata tersebut;

- c. menyediakan pelayanan jasa kepada operator pariwisata seperti; pelayanan makanan, transportasi, akomodasi dan panduan berwisata (*guiding*);
- d. membentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan pihak swasta, yang mana masyarakat lokal menyediakan lokasi dan pelayanan jasanya sedangkan pihak swasta menangani masalah pemasaran produk dan manajemen perusahaan;
- e. mengembangkan pariwisata secara mandiri dengan mengutamakan pengembangan pariwisata berbasis ke masyarakat (*community-based tourism*).

Masuknya pengusaha dalam pengembangan desa wisata memang dapat membangun area menjadi berkembang. Ada potensi pariwisata, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Satu diantaranya adalah Objek Wisata Batu Kapai yang terletak di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Pada objek ini hampir tidak ada sentuhan pembangunan destinasi (lihat gambar). Dari gambar ini, jalan menuju objek wisata saja hampir tidak bias dilalui mobil karena terlalu kecil dan hanya cukup untuk satu mobil, tidak ada warung di destinasi ini, pemukiman yang kumuh dan kondisinya sangat terbiarkan dapat dilekatkan dengan destinasi ini.

Disisi lain, dalam situs pemerintah, batu kapal ini ditetapkan sebagai salah satu objek wisata unggulan. Dengan menghubungkan kondisi ini, yang ingin saya katakan adalah program tidak mengikuti perencanaan pembangunan destinasi. Destinasi ini telah ditetapkan sebagai destinasi unggulan, namun perencanaan pembangunan dan pengembangannya tidak ada sehingga destinasi berkebang tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian, program menjadi tidak nyambung dengan perencanaan dan akibatnya tidak ada implementasi untuk pembangunan dan

pengembangan destinasi. Kondisi seperti ini, tidak hanya di Batu Kapal, pada destinasi lainnya juga demikian adanya. Jadi, perencanaan pariwisata di Kabupaten Natuna belum terlaksana sebagaimana mestinya sehingga program pengembangan destinasi belum berjalan sebagaimana mestinya.

Gambar 5.3
Kondisi ODTW Unggulan Yang Tanpa Sentuhan Pembangunan dan Perencanaan di Kabupaten Natuna, sampai tahun 2019



Sumber: Photo oleh Penulis, 2018

Objek lain yang juga tidak nyambung antara program pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah pada Pulau Sedanau. Banyak objek wisata di pulau ini ditetapkan sebagai destinasi, tetapi pembangunan ke arah ini hampir tidak ada. Destinasi berkembang tanpa sentuhan pembangunan dan bahkan luput dari perhatian pemerintah. Mengapa hal ini terjadi? Tentu salah satunya adalah masih banyaknya prioritas pembangunan oleh pemerintah daerah yang masih belum tercapai, sebagaimana petikan wawancara dengan bapak H. Hardinansyah, SE, M.Siberikut ini:

Pariwisata memang penting untuk dikembangkan oleh suatu daerah. Bagi Pemda Natuna, pengembangan objek wisata memang hampir menjadi sebuah dilemma di tengah masih banyaknya persoalan layanan public yang masih belum dapat diadakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Pemda saat ini lebih focus pada penyediaan layanan public yang lebih baik seperti kesehatan, pendidikan dan transportasi dan lainnya. Setelah layanan public dasar itu terpenuhi, barulah kita mengarah ke pengembangan destinasi wisata seiring dengan pembangunan dan pengembangan

dermaga dan bandara yang notabene masih menjadi kewenangan pusat. Tidak mungkin pemda mampu melakukan pembangunan dan pengembangan destinasi tanpa melibatkan kementerian pusat dan provinsi.

Gambar 5.4

**Destinasi Wisata Di Sedanau Yang Belum Tersentuh
Pembangunan Kondisi sampai dengan 2018**



Sumber: Photo oleh Penulis, 2018

Berbicara keindahan destinasi, tidak ada tempat yang tidak indah. Photo-photo berikut yang penulis gabung dari berbagai destinasi di Kabupaten Natuna memperlihatkan semua destinasi bahari dan pantai di daerah ini sangat indah. Namun sekali lagi, pelibatan masyarakat di dalamnya masih sangat kecil karena pemerintah pun masih belum hadir dalam pembangunan dan pengembangan destinasi.

Gambar 5.5

**Destinasi Wisata Pantai dan Bahari Yang Belum Tersentuh
oleb Pembangunan sampai dengan 2018**



Sumber: Photo oleh Penulis, 2018

Dari gambar-gambar di atas, tidak satupun objek yang tidak mengandung kebagusan dalam panorama dan keseluruhan objek dapat menjadi tempat swa photo (selfi) pengunjung. Pengunjung destinasi datang, foto, makan-minum, melakukan kegiatan tertentu dan pulang. Semua dilakukan dengan keinginan sendiri dan tidak pernah dilakukan dalam bentuk paket wisata.

Ketika ini yang akan dilakukan pemerintah, maka hal yang mesti diantisipasi adalah adanya kompetisi tidak saja dalam perebutan lapangan pekerjaan, tetapi juga dalam hal modal. Kelompok kapitalis local bersaing dengan pemodal kuat dari luar daerah. Jika kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang. Ketidakadilan berpotensi terjadinya konflik. Oleh karena itu, memberi ruang gerak bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan sangat diperiukan. Jika tidak, kenyamanan desa wisata akan dipertaruhkan. Pariwisata dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat desa.

Saat ini, kementerian pariwisata mengembangkan model pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism* atau disingkat CBT) yang merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat local sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata.

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah

- (1) *akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan*
- (2) *atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.*

Kaitannya dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata yang dilihat dari derajat partisipasi dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Sebagian besar masyarakat mengaku tidak dilibatkan dalam identifikasi masalah dan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Partisipasi dilakukan melalui keterlibatan RT dan RW dalam rapat desa. Memang mereka tidak pernah diajak berdialog dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi keinginan itu

telah disampaikan kepada RT dan RW sehingga suara mereka dianggap terwakilkan.

Kepala desa mencoba mengundang warga dalam beberapa rapat perencanaan. Tetapi, partisipasi yang diberikan itu tergolong minim sehingga Kepala Desa mengubahnya dengan bentuk partisipasi perwakilan RT dan RW saja. Tidak jalannya rapat dengan warga dapat difahami karena benefit yang diperoleh dari bentuk partisipasi yang dilakukan itu tidak menunjukkan hasil yang signifikan, meskipun substansi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat seharusnya bersifat aktif dan langsung.

Pengembangan desa wisata selama ini difahami sebagai program berbiaya besar dan mesti dilakukan dengan menggandeng investor. Ketergantungan terhadap pemerintah dan investor tinggi karena akan membangun infrastruktur kepariwisataan yang pasti memakan biaya tinggi. Kondisi ini berakibat pada kurangnya respons, antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan aset-aset di wilayah mereka. Dalam kondisi ini, kepala desa aparaturnya desa lainnya seperti BPD dan RT serta RW mencoba menembus kebuntuan ini dengan berbuat terlebih dahulu baru nanti menggaet investor. Dan, hasilnya cukup bagus.

Sebagai akhir dari bagian ini, disampaikan sebuah model pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dalam pengembangan desa wisata pada prinsipnya adalah partisipasi dalam mengelola sumber daya. Model ini boleh dipandang sebagai acuan dalam merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi program. Sebagai sebuah pendekatan, model yang dirumuskan ini tentu merepresentasikan partisipasi masyarakat dalam setiap aspeknya. Harapan

masyarakat dalam pengembangan desa wisata ke depan adalah (1) pengembangan desa wisata harus berpedoman pada potensi masyarakat dan lingkungan; (2) masyarakat harus terlibat penuh dalam pengembangan desa wisata; (3) menghargai hak-hak masyarakat lokal; (4) memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada di sekitar desa; (5) pemanfaatan rumah penduduk untuk akomodasi wisatawan (homestay); dan (6) ada kelembagaan otonom dan mandiri yang dibentuk oleh masyarakat lokal dibawah tanggung jawab desa adat.

Untuk menjadim agar masyarakat terlibat di dalamnya, maka program pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dirumuskan hal-hal sebagai berikut. (1) pengembangan desa wisata harus berpedomanan pada kebudayaan local; (2) masyarakat lokal menjadi sentral dan menjadikan subjek dari semua proses pengembangan desa wisata. Dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral diharapkan partisipasi masyarakat sebagai pemilik sumber daya pariwisata akan terdorong dan mampu menyejahterakan mereka; (3) pengembangan desa wisata membutuhkan adanya kemitraan yang solid antara tiga unsur utama, yaitu pemerintah, swasta, dan lembaga, yang masyarakat lokal menjadi pemangku kepentingan dari kerja sama tersebut; (4) ketiga pemangku kepentingan tersebut berada pada posisi yang sejajar dalam melakukan kerja sama serta saling menghormati; (5) perlu dibentuk badan pengelola yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi, memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi; (6) keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dibuat di tingkat lokal oleh warga masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan; dan (7) fokus

utama pengembangan desa wisata adalah memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada pada masyarakat local untuk memenuhi kebutuhannya.

Peran dan kewenangan masing-masing untuk memastikan usaha kepariwisataan bersifat berkelanjutan; perlu dirumuskan peran para pihak. Oleh karena itu peran dan kewenangan pemerintah, adalah (1) melakukan pembinaan kualitas produk dan kemasan kerajinan dan kuliner khas desa sebagai unsur kenangan wisata; (2) melakukan penataan dan konservasi lingkungan fisik kawasan yang menjadi ciri khas desa wisata; (3) melakukan perbaikan/pengadaan infrastruktur persampahan dan sanitasi; (4) melakukan gerakan masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona; (5) melakukan pembuatan informasi dan fasilitas kepariwisataan; (6) melakukan perbaikan/peningkatan kualitas ruang publik, pedestrian dan landscape desa/lingkungan untuk mendukung sapta pesona; dan (7) dukungan pemberdayaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pelestarian lingkungan pariwisata (kawasan Hutan, dan sawah).

Peran dan kewenangan pihak swasta (Investor, perguruan tinggi, LSM, pelaku pariwisata lainnya), yaitu (1) melakukan promosi terintegrasi antar pengelola objek wisata untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar objek wisata; (2) pembuatan dan pemasaran paket-paket wisata yang kompetitif yang terjangkau masyarakat; (3) pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan individual terkait usaha di bidang pariwisata (pelatihan bahasa Inggris, pelatihan hospitality, pelatihan mengenal budaya, dan karakteristik wisatawan dalam dan luar negeri); (4) pengembangan kelompok usaha bersama masyarakat; dan (5) menjalankan bisnis perhotelan, restoran, souvenir, dan lain-lain.

Peran masyarakat local agar destinasi bersinergi dengan dua peran di atasnya yaitu (1) menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata; (2) pelaku budaya, misalnya, kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata; dan (3) penyedia akomodasi dan jasa pemandu wisata, penyediaan tenaga kerja, produk makanan khas, kerajinan lokal, kesenian lokal, dan sebagainya.

Peran dan kewenangan badan pengelola pariwisata adalah (1) badan pengelola sebagai pengelola utama dan pengarah dalam perlindungan, perawatan, pelestarian guna mempertahankan fungsinya sebagai desa wisata (*cultural and natural heritage*); (2) melakukan pengaturan yang diperlukan dalam rangka pengembangan desa wisata yang terpilih; (3) menyediakan dan mengoperasikan segala fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha; (4) memberikan dan mencabut izin penempatan, menetapkan persyaratan-persyaratan, dan menetapkan serta melakukan pungutan segala usaha komersial di Kawasan wisata; (5) menetapkan dan memungut biaya atau retribusi dan pungutan lainnya atas pemanfaatan fasilitas yang tersedia dan hasil seluruhnya merupakan pendapatan badan pengelola; (6) melakukan perencanaan dalam bidang pengembangan atraksi/produk wisata, pengembangan fasilitas wisata; (7) melakukan pengorganisasian dalam bidang penguatan dan pengembangan kelembagaan; (8) melakukan pengarahan untuk peningkatan kompetensi pengelola objek wisata agar sesuai dengan tujuan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan; dan (9) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas kepariwisataan agar tercapainya tujuan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata terlihat dominan dengan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Untuk mewujudkan itu dilakukan secara terencana. Perencanaan itu akan tidak menghasilkan implementasi yang baik dan juga tidak dapat diharapkan hasilnya bilamana tidak ada perencanaan yang sistematis, terukur dan terprogram. Oleh karena itu, perencanaan pariwisata adalah awal dari usaha mewujudkan destinasi di Kabupaten Natuna secara lebih baik di masa mendatang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di luar tempat tinggalnya, bersifat sementara untuk berbagai tujuan yang tidak untuk mencari nafkah. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata diperlukan serangkaian upaya yang saling terkait dan terpadu oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan perpaduan ini, terbentuklah *good tourism governance*. Salah satu upaya mewujudkan keterpaduan itu dimulai dengan melakukan perencanaan pariwisata, yang tidak saja terhubung dengan kebutuhan turis (manca dan nusantara), tetapi juga tidak bertentangan dengan adat, budaya dan kearifan lokal. Berikut adalah konsep membangun keterpaduan itu melalui perencanaan:

1. Daerah membutuhkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) yang terintegrasi tidak saja ke dokumen perencanaan provinsi, tetapi juga perencanaan nasional sehingga destinasi daerah menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional. Hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini adalah dokumen perencanaan yang berkaitan dengan:
 - a. Perda penetapan kawasan atau zona wisata
 - b. Program pembangunan infrastruktur dan fasilitas destinasi pada kawasan-kawasan potensi.

- c. Peraturandaerah atau peraturan Bupati Natuna untuk mendukung pembiayaan dan pembinaan kepada desa yang telah memulai penmbangan dan pengembangan destinasi wisata.
 - d. Perencanaan Pengembangan Industri Pariwisata, diantaranya membentuk struktur industry kepariwisataan daerah, perencanaan mengembangkan kemitraan pariwisata, perencanaan mengenai peningkatan kredibilitas industry pariwisata daerah, perencanaan tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perencanaan mengenai tatakelola industry pariwisata serta perencanaan tentang pengendalian usaha bidang pariwisata, perencanaan pemasaran pariwisata, perencanaan pengembangan kelembagaan dan sumber daya kepariwisataan daerah; dan lain-lain.
2. Koordmasi dan koneksi yang tidak baik antar lintas SKPD yang menyebabkan perencanaan ketersediaan infrastruktur dikawasan Destinasi Wisata khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum di Kabupate Natuna, selingga Pelaksnaan pembangunan infrastruktur dasar tidak nyambung antara kebutuhan dan ketersediaan.
 3. Stategi Keterlibatan masyarakat dan Dunia usaha dibidang pariwisataakan menjadi salahsatu factor kuncipengembangan dan keberlanjutan. Kondisi ini sudah tercipta di beberapadestinas, meskipun dalam tahapan yang awalsekali. Oleh karena itu, wujud keterlibatan masyarakat masih tidak dalam bentuk atraksi wisata tetapi baru terhubung dengan kepentingan usaha dari pelaku pelaku usaha di destinasi. Dengan demikian mengembangkan dan mempertahankan usaha kepariwisataan didaerah destinasi membutuhkan perencanaan strategi yang sistematis dan matang, tidak saja rencana terkait pengaturan tindakan

pemerintah, tetapi juga pelaku usaha, masyarakat dan pihak lain yang terhubung dengan pengembangan destinasi. Apa bila ini tidak dilaksanakan maka Wilayah tersebut akan tetap tertinggal dan tidak Kompetitif.

B. Saran

Perencanaan sering dipandang sebagai sebuah dokumen yang tidak ada manfaat dan bahkan dianggap sebagai dokumen angan-angan. Namun, kejayaan pembangunan destinasi Diwali dari ketersediaan dokumen perencanaan karena dari sinilah akan muncul program yang kemudian dituangkan kedalam rencana aksi. Tanpa dokumen perencanaan, sebuah program atau kegiatan pemerintah dapat menjadi temuan yang akhirnya menyulitkan pemerintah itu sendiri. Sehubungan dengan itu, riset ini menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Natuna, untuk:

1. Melengkapi berbagai dokumen perencanaan mengenai pengembangan destinasi dan Mengacu kepada UU No 10 tahun 2009 sehingga mengundang banyak pihak dalam mengembangan Destinasi wisata di Kabupaten Natuna.
2. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik antar Lintas SKPD sehingga terjadi percepatan pembangunan kawasan wisata; dan tidak terjadi hal hal yang tidak nyambung dalam pembangunan infrastruktur dikawasan Destinasi Wisata unggulan.
3. Strategi Pelibatan masyarakat dan Dunia usaha dalam industry pariwisata terancang sedemikian rupa baik melalui aturan maupun tindakan nyata dari semua pihak yang saling bersinergi dalam memajukan insudtri pariwisata di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsemi, 2006. *Prosedur Penelitian, Edisi Revisi*, Bina Aksara. Jakarta. Algifari.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cornelissen, Scarlett. *The Global Tourism System: Governance, Development And Lessons from South Africa (New Directions in Tourism Analysis)*. Africa: Ashgate Publishing, 2005.
- Croley, Steven P. 2008. *Regulatory and Public Interest: The Possibility of Good Regulatory Government*. Princeton University Press. Princeton and Oxford. New Jersey.
- Erdi, 2011. *Implementasi Kebijakan Sektor pariwisata di Kota Singkawang, Kalimantan Barat*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Erdi, 2015. *Makna Harga Paket Wisata Di Mata Turis*. Dimuat pada Opini harian Pontianak Post pada hari Senin, 23 Maret; tersedia pada [https://www.academia.edu/11599398/...](https://www.academia.edu/11599398/)
- Gunn, C. A dan Var, Turgut. 2002. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*, 4th edition. New York: Routledge,
- Hall, C. Michael. 2018. *Tourism Planning: Policies, Process and Relationships*. Second Edition. Pearson Prentice Hall. Toronto.
- Holloway, J. Christopher. 2009. *The Business of Tourism*. PrenticeHall. London.
- Jeffries, David. 2001. *Governments and Tourism*. Butterborth-Heinemann; Elsevier Group. Oxford.

- Mathieson, A. dan Wall, G. *Tourism: Economic, Physical and Social Impacts*. New York: Longman, 1982.
- Matias, Alvaro; Peter Nijkamp dan Manuel Sarmento. 2011. *Tourism Economics: Impact Analysis*. Physic-Verlag. Berlin.
- Miles, Matthew B dan Huberman A, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mill, R.C., dan Morrison, A.M. *The Tourism System: An Introductory Text*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc., 1985.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Pratiwi, W. D. *Sistem Penawaran dan Permintaan, Kuliah 9*. Bahan kuliah Elemen dan Sistem Kepariwisata 21 Oktober 2010 Magister Terapan Perencanaan Kepariwisata. Bandung: ITB, 2010.
- Rahim, Abdul. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ritchie J.R. Brent dan Geoffrey I. Crougch, 2003. *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. Exon: CABI Puh.
- Ryan, Chris. 2003. *Recreational Touris: Demand and Impacts*. ChannelViewPublication. Clevedon.
- Scarpino, Michelle. *Tourism System: An Analysis of The Literature for Improved Subnational Development..* diunduh dari www.conferencedevelopment.com tanggal 12 Desember 2010. San Sebastian, Spanyol, 2009.
- Simatupang, Violetta. 2009. *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung:PT Alumni.
- Sugiyono, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Alfa Beta.

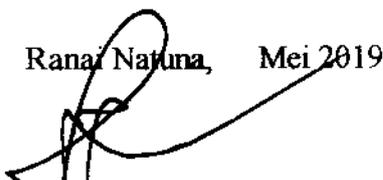
- Tribe, John. 2011. *The Economics of Recreation, Leisure and Tourism*. Edisi ke-4. Butterborth-Heinemann; Elsevier Group. Oxford.
- UNWTO. 2010. UNWTO Annuar Report 2010: A Year of Recovery. UN Wahingthon DC.
- World Travel and Tourism Council. 2011. Hainan: Travel and Tourism Depelopment Potential 2011 – 20021. The Authority on World Travel and Tourism. Paris.

Riwayat Hidup

Nama : **Khaidir**
NIM : 500581663
Program Studi : Administrasi Publik
Tempat/Tgl Lahir : Sedanau /

Riwayat Pendidikan : Lulus SDN 021 di Sedanau pada tahun 1988
Lulus MTs Ibnu Kholdun di Sedanau pada tahun 1991
Lulus MA Ibnu Kholdun di Sedanau tahun 1994
Lulus S1 IAIN SUSQO di Pekanbaru tahun 1998
Lulus S2 Universitas Terbuka 2019

Riwayat Pekerja : Tahun 1998 s/d 2002 Pegawai BMI di Pekanbaru
Tahun 2002 s/d 2003 Tenaga Honorer Pemkab Natuna
Tahun 2003 s/d 2006 PNS (Guru SMAN 1 Sedanau)
Tahun 2006 s/d 2011 Kepala SMPN1 Pulau Laut
Tahun 2011 s/d 2013 Kepala UPTD Pendidikan B,UTARA
Tahun 2012 s/d 2016 Kasubbag Agama Setda Natuna
Tahun 2016 s/d Sekarang, Kabag Ekonomi Setda Natuna

Rana Natuna, Mei 2019

Khaidir
NIM.500581663

Lampiran Wawancara :

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **KHAIDIR**
NIM : **500863586**
Judul : **PERENCANAAN PARIWISATA BERBASIS KEUNGGULAN KOMPETITIF DI KABUPATEN NATUNA**

1. Nama Yang Diwawancara : **AR 48 Tahun**
Jabatan : **Wisatawan Domestik**
Tanggal : **09 Mei 2019**

Bagaimana menurut bapak tentang perkembangan destinasi wisata Kabupaten Natuna?

Jawab: *Saya dapat memahami mengapa destinasi wisata di Kabupaten Natuna ini hampir tidak bergerak? Sejak ditetapkan menjadi daerah kabupaten tahun 1999, hingga saat ini tahun 2018, kondisi pariwisata di sini, ya begitu-begitu saja. Hampir tidak ada investasi pemerintah dalam membangun kawasan wisata, apalagi bernuasa keunggulan daerah. Investasi di sini hanya dilakukan oleh masyarakat yang kebetulan memiliki usaha. Mereka membangun warung dan tempat istirahat ini seadanya dengan tujuan menarik pengunjung agar mampir ke warung mereka dan bukan untuk menarik kunjungan wisatawan. Promosi kepada wisatawan nusantara dan apalagi kepada wisatawan manca secara terprogram hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, pemerintah agaknya tidak berani lakukan itu karena memang belum ada hal yang dapat kita suguhkan kepada mereka kecuali keindahan alam yang memang begini adanya.*

2. Nama Yang Diwawancara : **AR 48 Tahun**
Jabatan : **Wisatawan Domestik**
Tanggal : **09 Mei 2019**

Apa harapan ibu terhadap pemerintah untuk para pedagang yang ada disini?

Jawab: *Saya berharap, ke depan pemerintah Kabupaten Natuna dapat membangunkan kami tempat berjualan (bagi pedagang) yang representatif. Apa yang kami lakukan ini kan juga adalah untuk pelayanan kepada public. Judi, layanan kepada masyarakat dapat dititipkan kepada kami. Pemerintah, melalui Dinas pariwisata dapat melakukan kendali atau pengawasan atas layanan dan tingkat kepuasan kepada pengunjung. Adanya tempat berjualan ini juga akan memberi kesempatan kepada kami untuk berkembang secara sama dan wajar, memberi kontribusi pada PAD dan melakukan pencatatan melalui parkir yang masuk sehingga pemerintah memiliki data tentang jumlah pengunjung secara pasti. Jika semua itu ada, tinggal kami melakukan hal terbaik kepada pengunjung agar mereka dapat kemari terus dan setiap berkunjung kemari tentu akan mengunjungi warung kami ini.*

- 3. Nama Yang Diwawancara** : Amran
Jabatan : Kepala Desa Pengadah
Tanggal : 09 Mei 2019

Apa yang akan bapak lakukan untuk meningkatkan atau menghidupkan pariwisata yang ada di Desa Pengadah ini?

Jawab: *Sudah lama saya memikirkan ini. Ketika dilantik menjadi Kepala Desa Pengadah beberapa tahun lalu dan kemudian ada kahar pemerintah desa akan memperoleh dana desa (DD) sebesar Rp 1.4 M per tahun, saya pun melontarkan ide untuk membangun Kawasan Sungai Pengadah ini menjadi objek wisata. Apalagi, menurut aturan, DD harus juga dapat dilekatkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan informasi ini, saya menggiring ide ini agar dapat diterima oleh masyarakat. Pada tahun pertama penerimaan DD, ide ini tidak dapat direalisasikan, tetapi sosialisasi kepada masyarakat sudah viral, dan akhirnya melalui DD tahun ketiga, rapat desa menyepakati untuk membangun kawasan Sungai Pengadah ini menjadi objek wisata. Semua komponen masyarakat pun setuju; begitu juga pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) menyatakan kesetujuannya sehingga semua maju dan bergerak mewujudkan kawasan ini. Inilah, yang kemudian dapat diwujudkan dan dapat dinikmati tidak saja oleh masyarakat sini, tetapi juga oleh pihak lain yang berkunjung ke objek wisata ini.*

- 4. Nama Yang Diwawancara** : **Bahtiar 42 Tahun**
Jabatan : **Aparatur Desa**
Tanggal : **09 Mei 2019**

Bagaimana menurut Bapak tentang pemerintah menetapkan lima destinasi utama wisata di Kabupaten Natuna?

Jawab: *"Saya setuju ketika pemerintah menentukan lima destinasi utama sebagai titik awal pergerakan pembangunan destinasi di Kabupaten Natuna ini. Mengapa Alif Stone tidak dipilih, saya paham karena destinasi itu sudah diserahkan ke pihak investor; begitu juga Pulau Senua yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh BKSDA Pusat sehingga pemda memiliki akses terbatas pada kedua kawasan itu ketika hendak mengembangkannya menjadi destinasi unggulan daerah. Biarlah kedua destinasi itu disenergikan dengan lima destinasi unggulan pilihan pemda. Selain memilih lima destinasi unggulan daerah, saya mengusulkan agar Masjid Raya Natuna juga dipilih sebagai destinasi wajib sehingga Pemda memiliki 6 destinasi unggulan. Di kompleks masjid Raya ini semestinya dikembangkan sebagai pusat peradaban, ilmu pengetahuan dan bisnis syariah mengingat bangunan di komplek ini saling terpisah sehingga keberadaan berbagai pusat tersebut tidak mengganggu masyarakat yang melakukan ibadah"*

- 5. Nama Yang Diwawancara** : **Asmir**
Jabatan : **Pejabat BP3D Kabupaten Natuna**
Tanggal : **09 Mei 2019**

Menurut Bapak apa saja kelemahan yang ada terkait dengan kepariwisataan di Kabupaten Natuna ?

Jawab: *"Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pembangunan di bidang kepariwisataan diantaranya adalah SKPD yang berjalan sendiri-sendiri dan Dinas Pariwisata tidak menginformasikan secara detil apa yang harus dilakukan oleh SKPD lainnya. Akibatnya, program dan kegiatan berjalan seperti terlepas dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Bappeda fungsinya sebagai koordinator saja. Koordinasi adalah kelemahan*

utama kita selama ini. Dukungan terhadap sektor-sektor yang diunggulkan tidak terlalu kelihatan, sehingga upaya yang harus dilakukan dan dimasukkan ke dalam usulan Musrenbang semestinya dimulai dari bawah. Kalau di level perencanaan saja masih terdapat kelemahan sehingga implementasi koordinasi di level pelaksanaannya sangat rendah”.

- 6. Nama Yang Diwawancara : Herman**
Jabatan : Pejabat Bappeda Kab. Natuna
Tanggal : 09 Mei 2019

Apa saja pembahasan dan usulan berkaitan kemajuan bidang pariwisata di Kabupaten Natuna ?

Jawab: *“Pembahasan tentang rencana program pembangunan bidang kepariwisataan masih tidak sempurna. Banyak SKPD yang tidak dilibatkan, padahal pariwisata sebagai sebuah aksi Bersama yang semestinya melibatkan banyak SKPD. Akibatnya, banyak kelemahan yang terjadi dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata. Indikatornya saja banyak yang tidak pas, sehingga kita tidak terlalu yakin tingkat kebenarannya sebagai dokumen rencana yang layak dijadikan sebagai acuan. Sementara itu di sisi lain kurangnya koordinasi dalam perencanaan anggaran seringkali membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seakan-akan “dipaksa” menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Akibatnya capaian kegiatan tidak bisa dilakukan dengan baik, karena pelaksana kegiatan harus mencari jalan bagaimana menyasati keterbatasan anggaran di satu pihak, dan mencoba mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.*

- 7. Nama Yang Diwawancara : Tenggo**
Jabatan : Pelaku Usaha
Tanggal : 09 Mei 2019

Apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Natuna?

Jawab: *ke depan diperlukan paling tidak kelembagaan usaha bersama yang dapat mempersatukan para pedagang yang merupakan warga local di sini yang memiliki usaha. Untung bilamana pemerintah dapat memfasilitasinya hingga menjadi koperasi berbadan hukum atau*

BUNDes seperti di Desa Pengadah. Rasanya, pemerintah perlu juga memperhatikan kelembagaan usaha itu agar kami bias lebih baik lagi dalam mengelola usaha.

Apakah pedagang yang berjualan disini semuanya penduduk disekitar sini atau ada pedagang yang datang dari luar untuk berjualan disini?

Jawab: *Semua pedagang yang berjualan di sini adalah penduduk sini dan belum ada orang luar yang datang. Kami dulu, sekitar 10 tahun lalu hanya berjumlah 2 orang saja dan alhamdulillah kini sudah menjadi 8 orang. Berarti ada penambahan pelaku usaha. Setiap warung, mempekerjakan minimal dua orang; bisa dari anggota keluarga, dapat pula memang kita ambil orang lain untuk kerja dengan kita. Dengan demikian, pekerja di warung sini berjumlah 16 orang dari 8 pedagang tetap. Kalau hari Sabtu dan Minggu, terkadang ada pedagang dari Batam dan Pinang yang juga gelar dagangan mereka di sini.*

- 8. Nama Yang Diwawancara : ARI 50 Tahun**
Jabatan : Wisatawan
Tanggal : 09 Mei 2019

Bagai mana menurut bapak tentang perkembangan pariwisata di Kabupaten Natuna?

Jawab: *Saya merasa pemerintah belum berbuat banyak dalam mengembangkan destinasi wisata. Ini mungkin kondisi pengunjung luar yang masih sangat terbatas sehingga ketika toko kerajinan, toko cindramata (souvenir), warung makan dan lain-lain beroperasi di sini, tingkat keberlanjutan usaha masih belum pasti. Oleh karena itu, pemerintah perlu merencanakan untuk membuka akses sebanyak-banyaknya bagi kedatangan wisatawan dari nusantara dan manca. Salah satu peluang adalah perencanaan dermaga yang memungkinkan kapal pesiar datang dan berlabuh di Natuna. Ketika hanya mengandalkan penerbangan udara, maka kemungkinan kedatangan wisatawan ke Natuna akan masih sangat terbatas dan sedikit.*

9. Nama Yang Diwawancara **H. Hardinansyah, SE, M**
Jabatan **: Kadis Pariwisata Kabupaten**
Natuna
Tanggal **: 09 Mei 2019**

Apa saja program pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pengembangan pariwisata Kabupaten Natuna kedepan?

Jawab: *Pariwisata memang penting untuk dikembangkan oleh suatu daerah. Bagi Pemda Natuna, pengembangan objek wisata memang hampir menjadi sebuah dilemma di tengah masih banyaknya persoalan layanan public yang masih belum dapat diadakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Pemda saat ini lebih focus pada penyediaan layanan public yang lebih baik seperti kesehatan, pendidikan dan transportasi dan lainnya. Setelah layanan public dasar itu terpenuhi; barulah kita mengarah ke pengembangan destinasi wisata seiring dengan pembangunan dan pengembangan dermaga dan bandara yang notabene masih menjadi kewenangan pusat. Tidak mungkin pemda mampu melakukan pembangunan dan pengembangan destinasi tanpa melibatkan kementerian pusat dan provinsi.*